

**PERILAKU PEMILIH DI KEPULAUAN TANAKEKE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR
TAHUN 2017**

***VOTERS' BEHAVIOR IN TANAKEKE ISLANDS
OF THE ELECTION OF REGENT AND VICE REGENT
OF TAKALAR IN 2017***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister



**AZHARI JUPRI
P4300216305**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

TESIS

**PERILAKU PEMILIH DI KEPULAUAN TANAKEKE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

Disusun dan diajukan oleh

AZHARI JUPRI

Nomor Pokok P4300216305

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **22 Januari 2019**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat



Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.

Ketua

Ketua Program Studi
Ilmu Politik,



Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.



Dr. Andi Samsu Alam, M.Si.

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZHARI JUPRI

NIM : P4300216305

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Januari 2019



Azhari Jupri



KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmani Rahim....

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perilaku Pemilih di Kepulauan Tanakeke pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017”. Tesis disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka penyelesaian studi dan guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, olehnya itu penulis mengharapkan saran dan kritikan membangun untuk perbaikan dalam penulisan Tesis ini. Selain itu, dimulai sejak perumusan awal Tesis ini, pengumpulan data dan informasi hingga penyelesaian Tesis ini telah mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Toraja Utara atas kesempatan dan dukungan biaya untuk melanjutkan studi di Universitas Hasanuddin. Mohon maaf untuk beberapa tahapan pemilu yang terlewatkan selama mengikuti proses perkuliahan.
3. Prof. Dr. Armin., M.Si selaku Dekan Fisip Unhas dan juga sebagai

penyaji dan penguji.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik dan Bapak/Ibu dosen pembimbing I sebagai Pembimbing I Tesis. Terimakasih atas segala



masukan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si., selaku Pembimbing II Tesis. Terima kasih atas segala masukan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. A.M. Rusli, M.Si., selaku penguji sidang Tesis. Terima kasih atas segala masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si., selaku penguji sidang Tesis. Terima kasih atas segala masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Alm. Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA., Selaku Guru Besar Ilmu Politik Unhas. Semoga segala amal bakti beliau semasa hidup mendapat balasan Surga. Aminn Yaa Allah.
9. Seluruh Staff Pengajar dan Staff Akademik di Pascasarjana dan Fisip Unhas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Dr.(Candidat) Zarni Adia Purna, S.IP., M.Si & Avrina Dwijayanti, S.IP., M.A., yang senantiasa membantu dan menjadi teman diskusi penulis dalam penyusunan tesis ini.
11. Kedua orang tua penulis, terimah kasih atas segala curahan doa, kasih sayang dan dukungannya kepada penulis selama ini.
12. Adinda Imrihayah Jufri, S.Pd beserta suami Muh. Irham, Adinda Risky Suci Aulia Sari, S.Ked yang senantiasa menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
13. Keluarga Hamsah ST Dg. Nassa, terima kasih atas tumpangan tempat tinggal selama penulis menyelesaikan studinya di Makassar.
14. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungannya kepada penulis selama menyelesaikan proses perkuliahan.

an-rekan seperjuangan mahasiswa Ilmu Politik Pascasarjana
ersitas Hasanuddin Angkatan 2016, terkhusus buat rekan-rekan
Kelola Pemilu Batch 2, terimakasih atas segala pengalaman dan



kebersamaan selama menjalankan proses perkuliahan, semoga silaturahmi tetap terjaga diantara kita.

16. Rekan-rekan mahasiswa mahasiswa Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Hasanuddin Angkatan 2015, 2017 dan 2018, terkhusus rekan-rekan TKP Batch 1, Batch 3 dan Batch 4.
17. KPU Kab. Takalar beserta jajarannya, Bawaslu Kab. Takalar beserta jajarannya, Pemerintah Kab. Takalar, serta masyarakat di Kepulauan Tanakeke yang menjadi lokasi penelitian penulis.
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan bantuan, motivasi dan doanya. Semoga Allah SWT membalas kebaikannya. Aamiin.

Terakhir dan yang tak akan terlupakan, yang selalu menjadi penyemangat dalam penyelesaian proses perkuliahan, Aprida Fadilah Darwis, SP., terimakasih atas segala dukungan dan do'anya selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan.

Akhir kata, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sekian dan terimah kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Makassar, 28 Januari 2019

Penulis,

ttd.

Azhari Jupri



ABSTRAK

AZHARI JUPRI. *Perilaku Pemilih di Kepulauan Tanakeke pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017* (dibimbing oleh Muhammad dan Andi Samsu Alam).

Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku pemilih di Kepulauan Tanakeke pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 berdasarkan pendekatan psikologis (*The Michigan Model*) melalui variabel ikatan emosional dengan partai, orientasi terhadap kandidat, dan orientasi terhadap isu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data ditempuh dengan wawancara mendalam, FGD, dan kajian dokumen terhadap masyarakat yang menyalurkan hak pilih pada Pilkada Takalar 2017. Proses analisis data melalui pereduksian data, penyajian data, dan penyimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ikatan emosional yang dibentuk oleh masyarakat tergolong rendah, masyarakat cenderung mengidentifikasi diri sebagai bagian dari partai tertentu; (2) orientasi masyarakat terhadap kandidat selalu berada dalam kesan positif, masyarakat mengenal kandidat dalam informasi personal; dan (3) orientasi terhadap isu masih berkutat pada isu elitis, kondisi ini diakibatkan oleh pola patron-klien, masyarakat cepat merespon isu yang melibatkan aktor politik bukan pada isu profesionalisme, korupsi atau pun rekam jejak aktor.

Kata kunci: perilaku pemilih, pendekatan psikologi, Kepulauan Tanakeke, Pilkada Takalar 2017



ABSTRACT

AZHARI JUPRI. *Voters' Behavior in Tanakeke Islands of the Election of Regent and Vice Regent of Takalar in 2017* (supervised by **Muhammad and Andi Samsu Alam**)

The aim of this research is to analyse voters' behaviour in Tanakeke Islands of the election of regent and vice regent of Takalar in 2017 based on psychological approach (The Michigan Model) through emotional bond variable with parties, orientation on candidates, and orientation on issues.

The research used qualitative approach with a case study. The data were obtained through in-depth interview, FGD, and documentation study on the society who gave their voting rights in regional head election of Takalar in 2017. The processes of data analysis were data reduction, data presentation, and drawing conclusion.

The results of the research indicate that (1) emotional bond formed by community is low; community tends to identify themselves as a part of a certain party only if there is a character who becomes an icon of a particular party, (2) community orientation on the candidates is always in a positive impression; community knows candidates in personal impression, (3) orientation on issue is still around elitist issue; this condition is caused by patron-client pattern and the community quickly responds the issue involving political actors who are not professionalism issue, corruption, or actors' track record.

Key words: voters' behaviour, psychological approach, Tanakeke Islands, regional head election of Takalar in 2017



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Perilaku Pemilih	16
2.1.1 Pendekatan Sosiologis	28
2.1.2 Pendekatan Pilihan Rasional	31
2.1.3 Pendekatan Psikologis	33
2.1.3.1 Keberpihakan (Partisanship/Party ID)	36
2.1.3.2 Saluran Kausalitas	41



2.1.3.3	Faktor Proximal dan Distal	41
2.2	Patrimonialisme Politik	46
2.3	Masyarakat Kepulauan	50
2.4	Konsep Pemilu.....	53
2.5	Penelitian Terdahulu.....	56
2.6	Relevansi Teoritis	62
2.7	Signifikansi Penelitian	72
2.8	Kerangka Pikir.....	75
2.9	Defenisi Operasional	77
BAB III METODELOGI PENELITIAN		78
3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	78
3.2	Pengelolaan Peran Peneliti.....	79
3.3	Lokasi Penelitian.....	79
3.4	Sumber Data.....	79
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	81
3.6	Teknik Analisis Data	82
3.7	Pengecekan Validitas Temuan.....	83
3.8	Tahap-Tahap Penelitian.....	84
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		85
4.1	Gambaran Umum Pilkada Takalar	85
4.2	Hasil Pilkada Takalar 2017.....	88
3	Profil Pasangan Bur-Nojeng	90
4	Profil Pasangan SK-HD	93



BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
5.1 Hasil Penelitian	97
5.1.1 Identifikasi Partai	97
5.1.2 Orientasi Terhadap Kandidat	108
5.1.3 Orientasi Terhadap Isu	117
5.2 Pembahasan	123
5.2.1 Ikatan Emosional Dengan Partai	125
5.2.2 Orientasi Terhadap Kandidat	139
5.2.3 Orientasi Terhadap Isu	142
BAB VI PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN	158



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Informan.....	80
Tabel 3.2. Tahap - Tahap Penelitian dan Jadwalnya	84
Tabel 4.1. Perbandingan Kursi Pengusung	87
Tabel 4.2 Hasil Pilkada Takalar 2017	89
Tabel 5.1. Alasan Partai Populer	105
Tabel 5.2. Isu Dominan di Masyarakat	117
Tabel 5.3. Sebaran isu berdasar umur	118
Tabel 5.4. Matriks Hasil Penelitian dan Pembahasan	149



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	76
Gambar 4.1	Foto Bapak Dr. H. Burhanuddin B., SE., M.Si	91
Gambar 4.2	Foto Bapak H.M Natsir Ibrahim, M.M	92
Gambar 4.3	Foto Bapak H. Syamsari Kitta, S.Pt.,M.M	94
Gambar 4.4	Foto Bapak H. Achmad Dg. Se're, S.Sos.....	95
Gambar 5.1	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan visi kepartaian	99
Gambar 5.2	Peran masyarakat dalam partai pengusung	101
Gambar 5.3	Tingkat popularitas partai dimasyarakat	104
Gambar 5.4	Konsistensi masyarakat memilih partai	107
Gambar 5.5	Pengetahuan masyarakat mengenai latar belakang kandidat	109
Gambar 5.6	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap visi dan misi kandidat	112
Gambar 5.7	Tingkat kepuasan terhadap kinerja petahana	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi dan gelombang demokratisasi beberapa dekade terakhir telah banyak merubah manifesto politik dibanyak negara sebagai kritik terhadap model pemerintahan totaliter yang cenderung mengabaikan legitimasi rakyat sebagai dasar suatu pemerintahan. Padahal sejatinya tidak ada Negara dan pemimpin tanpa ada kesediaan rakyat untuk dipimpin. Dewasa ini, demokrasi secara sederhana dapat dimaknai dengan ungkapan “rakyat memilih maka rakyat ada” dimana dari konteks tersebut dapat dipahami jika eksistensi demokrasi hanya dapat dibuktikan dengan keberadaan dan keterlibatan rakyat dalam proses politik suatu Negara. Lagipula, mayoritas ahli telah sepakat bahwa esensi dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*). Yaitu suatu keadaan dimana rakyat berpendapat dan percaya bahwa sumber kekuasaan pemerintah (negara) adalah rakyat. Tanpa persetujuan rakyat, kekuasaan negara tak memperoleh legitimasinya.

Salah satu pengejawantahan dari pemikiran ini adalah pemilihan umum. Setiap negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pemilu merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal, pemilu bertujuan untuk memastikan terjadinya peralihan kekuasaan pemerintahan secara teratur



dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.¹ Dengan demikian, pemilihan umum menjadi syarat mutlak dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis, sehingga melalui pemilu sebenarnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan: *pertama*, memperbarui kontrak sosial; *kedua*, memilih pemerintahan baru; dan *ketiga*, menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru.²

Pemilu digunakan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang baik dan jujur dan sekaligus wadah suara rakyat. Namun pada pelaksanaannya seringkali rakyat dibingungkan untuk menentukan pilihannya, dikarenakan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu dengan memberikan suapan atau janji-janji belaka kepada rakyat sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa suara yang dihasilkan pada pemilu bukan benar-benar suara rakyat.

Angka golput yang relatif tinggi dan tingkat antusiasme rakyat pada pemilu yang terkesan jauh dari hakikat partisipatif, sementara partisipasi pemilih merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Sekaligus merupakan ciri khas adanya reformasi politik di Indonesia yang jika dihubungkan dalam paragraf pembuka, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik tidak saja berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan melainkan juga terhadap perjalanan demokrasi di tanah air pada

a.

_____iana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha, hlm. 5.



Mengikuti Pemilu merupakan urusan pribadi, meskipun hal ini menyangkut urusan kenegaraan (publik). Ketika datang ke bilik-bilik suara, pilihan-pilihan yang dibuat juga merupakan dari masalah pribadi.³ Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia bukan hanya terjadi dalam bilik suara, melainkan menjadi satu kesatuan dari sebuah manajemen Pemilu, oleh karena itu Pemilu yang baik bukan saja Pemilu yang dilihat dari perspektif kepesertaan Pemilu, penyelenggara Pemilu semata tetapi juga partisipasi masyarakat dalam semua tahapan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi peserta pemilu, pencalonan, kampanye hingga penetapan hasil Pemilu. Beragam model partisipasi masyarakat dalam setiap momentum Pemilu menandainya adanya potret perilaku sosial yang sangat kompleks.

Perilaku pemilih yang terwujud dalam bentuk partisipasi masyarakat dengan segala bentuknya kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri (otonom) yang tidak berhubungan dengan pihak lain. Fakta lain justru menunjukkan bahwa perilaku pemilih (masyarakat) dianggap ditentukan secara mutlak oleh peserta pemilu baik individu kandidat



27.

peserta pemilu, *platform* partai bahkan juga ditentukan oleh pragmatisme politik dengan janji-janji materi dari para kontestan Pemilu.

Dalam laporan riset partisipasi masyarakat dalam pemilu di tingkat KPU Kabupaten Bondowoso dengan tema perilaku pemilih kerjasama Komisi Pemilihan Umum dan lembaga penelitian Universitas Jember pada tahun 2015, menyebutkan bahwa partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Ia adalah fondasi praktik demokrasi perwakilan. Persoalannya, terdapat sejumlah masalah menyangkut partisipasi pemilih yang terus menggelayut dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sayangnya, persoalannya itu tidak banyak diungkap dan sebagian menjadi ruang yang terus menyisakan pertanyaan. Beberapa persoalan terkait dengan partisipasi dalam pemilu diantaranya adalah fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat melek politik warga, dan langkahnya kesukarelaan politik.

Perilaku pemilih erat hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam tahapan Pemilu, salah satu yang dapat dilihat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar yang dilaksanakan secara serentak Tahun 2017, dimana nuansa politik kepentingannya lebih dekat dengan masyarakat, aktor-aktor yang terlibat lebih kompleks dan dinamikanya di lapangan juga sangat unik. Sikap dan perilaku individu dalam menghadapi situasi Pemilu merupakan bagian dari cermin masyarakat Takalar yang

s, baik perilaku yang didorong oleh motif individu yang arkan pada kesadaran atau bahkan perilaku pemilih atau



masyarakat yang dipicu oleh berbagai peristiwa dan momentum dalam Pemilu, aktor-aktor Pemilu juga budaya yang telah mengakar ditengah masyarakat.

Pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Serentak Tahun 2017, dimana ini merupakan periode kedua dilaksanakannya Pilkada secara serentak di Indonesia, Kabupaten Takalar merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Pilkada. Kondisi ini mengakibatkan fokus perhatian para elite serta tokoh politik Sulawesi Selatan pada umumnya serta masyarakat Kabupaten Takalar pada khususnya memberikan perhatian yang lebih terhadap proses pemilihan tersebut. Dimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar ini menurut beberapa kalangan merupakan ajang pemanasan bagi setiap partai politik dan calon yang akan bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan yang akan berlangsung tahun 2018.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, diikuti oleh 2 (dua) pasang calon yakni pasangan nomor urut 1 (satu) H.Burhanuddin Baharuddin dan M. Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) dan pasangan nomor urut 2 (dua) Syamsari Kitta dan Achmad Dg. Se're (SK-HD). Dimana pasangan Bur-Nojeng merupakan pasangan petahana dan mendapatkan dukungan dari koalisi besar partai politik dengan 9 partai pengusung yakni Golkar, PPP, Demokrat, Gerindra, Hanura, PDIP, PAN, PBB dan PKPI,

dan pasangan SK-HD hanya didukung oleh 3 partai yakni PKS, dan PKB.



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar yang telah berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 ini dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 (SK-HD) dengan perolehan suara sebanyak 88.113 (50,58 %), sedangkan pasangan petahana nomor urut 1 (Bur-Nojeng) hanya memperoleh suara sebanyak 86.090 (49.42 %).⁴

Melihat hasil daripada pemilihan bupati dan wakil bupati di Takalar ini, dapat menunjukkan bahwa dewasa ini, banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Dimana jika dilihat dari potensi kekuatan dari pasangan Bur-Nojeng yang merupakan pasangan petahana ditambah dengan dukungan koalisi partai besar dapat ditumbangkan oleh pasangan SK-HD yang notabannya hanya didukung oleh koalisi partai kecil.

Kalahnya pasangan petahana yang bertarung secara *head to head* dengan pasangan penantang menjadi sebuah pertanyaan besar, dimana potensi untuk memenangkan pemilihan diatas kertas jelas petahana sangat diunggulkan. Juga melihat dari hasil survey menjelang pemilihan, pasangan petahana selalu di unggulkan akan memperoleh kemenangan telak. Ini menunjukkan bahwa perilaku pemilih perlu dianalisis lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perilaku masyarakat dalam memberikan pilihan politiknya dalam setiap momentum pemilihan.



kada2017.kpu.go.id/hasil/t2/sulawesi_selatan/takalar

Secara umum tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 termasuk dalam kategori tinggi yakni mencapai angka 83,5 %.⁵ Walaupun angka ini belum memenuhi target KPU Kab. Takalar sebagai penyelenggara pemilu yakni sebesar 85 %.

Peningkatan partisipasi masyarakat ini tidak terlepas dari giatnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di semua tingkatan (KPU dan Panwas). Disamping itu peranan para organisasi peserta pemilu (OPP) dalam melakukan sosialisasi dan kampanye turut serta memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat untuk ikut memberikan pilihannya. Peranan media, juga tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh dalam memberikan pendidikan politik dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Salah satu daerah di Kabupaten Takalar yang mengalami peningkatan dalam segi partisipasi pemilihnya yaitu di Kepulauan Tanakeke. Dimana tingkat partisipasi pemilih disini sangat dinamis dalam setiap pelaksanaan pemilihan. Pada pilkada kali ini, tingkat partisipasi di Kepulauan Tanakeke mencapai sekitar 80%.⁶ Tingkat partisipasi ini termasuk tinggi mengingat kondisi demografi, geografis, serta adat dan budayanya yang merupakan daerah kepulauan.

Kepulauan Tanakeke merupakan gugus kepulauan yang berada di wilayah Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Kepulauan

ke sendiri sebelumnya terdiri atas dua desa yang kemudian

Cit



dimekarkan menjadi lima 5 (lima) desa, yaitu Desa Mattiro baji, Desa Tompo Tanah, Desa Rewatayya, Desa Balangdatu dan Desa Maccini Baji.⁷ Menurut data statistik tahun 2015, jumlah penduduk di Kepulauan Tanakeke sebanyak 6.523 Jiwa.⁸ Jarak tempuh ke Kepulauan Tanakeke yang terdekat adalah sekitar 1-2 jam perjalanan menggunakan perahu, namun untuk pulau-pulau terluar di Kepulauan Tanakeke ada yang jarang tempuhnya bisa mencapai 5-6 jam perjalanan menggunakan perahu dengan kondisi cuaca yang bagus.

Peningkatan partisipasi pemilih sangat berkaitan erat dengan perilaku memilih dalam suatu masyarakat. Kondisi masyarakat yang sangat kompleks seperti di Kepulauan Tanakeke akan sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakatnya. Hal ini menjadi menarik dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana karakteristik masyarakat di Kepulauan Tanakeke dalam pemilu.

Perilaku masyarakat dalam memberikan pilihannya dapat dilihat dari beberapa tipe, seperti masyarakat yang bersifat rasional, kritis, tradisional dan skeptis. Banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, seperti kondisi sosiologis, psikologis dan pilihan rasional masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Dalam dunia akademik, terdapat 3 pendekatan besar yang digunakan dalam melihat perilaku pemilih, yaitu *The Columbia Study*, *The*

n Model, dan *Rational Choice* (Bartels, 2012; Roth, 2008). Ketiga



kalarkab.go.id
n Dalam Angka Mappakasunggu, 2016

pendekatan tersebut lebih dikenal dengan istilah sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. *The Columbia Study* dipelopori oleh Lezarsfeild pada tahun 1940 yang kemudian lebih dikenal dengan model atau pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis memperlihatkan bahwa ada pengaruh antara nilai-nilai sosiologis yang menempel pada diri individu yang memengaruhi perilaku seseorang dalam politik. Nilai-nilai sosiologis tersebut berupa agama, kelas sosial, etnis, daerah, tradisi keluarga dan lain-lain.⁹ Berangkat dari teori lingkaran sosial, setiap manusia terikat dalam berbagai lingkaran sosial seperti keluarga, tempat kerja, pertemanan dan lain sebagainya. Teori ini kemudian digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih. Asumsinya bahwa seorang pemilih hidup dalam konteks tertentu yaitu status ekonomi, agama, tempat tinggal, pekerjaan dan usia. Sehingga mendefinisikan lingkaran social yang mempengaruhi keputusan pemilih, disebabkan kontrol dan tekanan sosialnya.¹⁰

Menurut Roth, model sosiologis dapat memberi penjelasan yang sangat baik pada perilaku pemilih yang konstan. Hal ini disebabkan kerangka struktural masing-masing individu yang hanya berubah secara perlahan. Namun, model sosiologis tidak dapat menjelaskan mengenai penyebab pindahnya pilihan politik individu.¹¹ Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa basis analisis utama dari model ini adalah kondisi



M. "The Study of Electoral Behavior" dalam Jan E. Leighley (ed) *The Oxford handbook of Elections and Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press. 2012. Hal 240
Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen dan Metode. Jakarta: riderich-aumann-
die Freiheit. 2008. Hal 24

sosial, bukan menjadikan individu sebagai pusat analisis. Adapun instrumen yang menjadi basis analisis sosiologis yakni agama, etnis, pendidikan, tempat tinggal (desa-kota), pekerjaan, gender, umur dsb (Mujani *et al.*)¹². Begitu juga dengan geopolitik (kedaerahan), merupakan basis analisa perilaku politik dalam model sosiologis.

Pendekatan perilaku pemilih selanjutnya yakni *The Michigan Model*, sebuah metode untuk mengetahui perilaku pemilih yang berkembang awal tahun 1950-an. *The Michigan Model* kemudian dikenal dengan nama pendekatan psikologis yang uraiannya secara lengkap dapat dilihat dalam "*The American Voter*" (1960) ditulis oleh Campbell, Converse, Miller, dan Stokes. Berbeda dengan model sosiologis, dalam model psikologis, adanya keterikatan atau dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang. Ikatan psikologis tersebut disebabkan oleh adanya perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat. Persepsi dan penilaian individu terhadap kandidat atau tema-tema yang diangkat (pengaruh jangka pendek) sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu. Secara sederhana menurut Roth,¹³ pendekatan psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pemilu melalui *trias determinant*, identifikasi partai (*PartyID*), orientasi kandidat dan orientasi isu.

Pendekatan perilaku pemilih yang terakhir yakni model *rational*

atau pilihan rasional. *Rational choice* adalah sebuah pendekatan



_____, R. W. Liddle & K. Ambardi. Kuasa Rakyat. Jakarta: Mizan. 2012
_____. Hal 38

perilaku pemilih yang merupakan kritik terhadap dua model pendekatan yang sudah ada yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis. Ada kegelisahan ilmuwan melihat perubahan-perubahan perilaku pemilih yang tidak bisa dijelaskan oleh dua pendekatan tersebut. Latar belakang teoritis untuk penjelasan pendekatan ini berangkat dari teori ekonomi (Mujani, *et al*; 2012; Bartels, 2012). Model ini merupakan upaya untuk menjelaskan perilaku pemilih yang berhubungan dengan parameter ekonomi-politik. Premisnya sederhana, jika asumsi pilihan rasional mampu menjelaskan pasar, maka hal ini juga dapat menjelaskan fungsi politik. Operasi model ini didasarkan bahwa semua keputusan yang telah dibuat oleh pemilih bersifat rasional, yakni dipandu oleh kepentingan diri sendiri dan diberlakukan sesuai dengan prinsip maksimalisasi manfaat. Pilihan politik pemilih yang rasional senantiasa berorientasi kepada hasil yang dicapai oleh partai atau kandidat tertentu dalam politik, baik hasil yang dipersepsikan maupun yang diantisipasi.¹⁴

Melihat dari ketiga pendekatan tersebut, untuk konteks masyarakat di Kabupaten Takalar terutama di Kepulauan Tanakeke, menurut analisa penulis akan lebih tepat untuk mengkaji perihal perilaku pemilih dari salah satu pendekatan saja, yakni pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis dipilih mengingat kondisi masyarakat Takalar yang cenderung homogen, disamping itu pendekatan psikologis juga dapat lebih



. Hal 49

menguraikan tentang peran partai politik, kandidat dan isu yang berkembang di masyarakat dalam memberikan preferensi politik.

Peningkatan partisipasi pemilih di Kepulauan Tanakeke pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2017 tidak terlepas dari perilaku politik masyarakatnya dalam menentukan pilihannya. Kecenderungan masyarakat kabupaten Takalar terutama di Kepulauan Tanakeke dalam memberikan preferensi politiknya yang cenderung beragam dalam setiap momentum politiknya menjadikan permasalahan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Disamping untuk mengetahui alasan dibalik pilihan tersebut juga untuk melihat sejauh mana faktor-faktor psikologis dapat memberikan pengaruh terhadap preferensi politik masyarakat dalam pemilu.

Hal ini menjadikan perilaku pemilih masyarakat di Kepulauan Tanakeke menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Bagaimana melihat faktor ikatan emosional dengan partai politik tertentu, orientasi terhadap kandidat serta orientasi terhadap isu dapat memberikan pengaruh terhadap preferensi politik masyarakat di Kepulauan Tanakeke. Dari uraian tersebut, maka rencana judul penelitian yang ingin dilakukan adalah : “Perilaku Pemilih Di Kepulauan Tanakeke Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017”

1.2. Rumusan Masalah

alam upaya untuk mengejawantahkan nilai demokrasi secara
aruh dan konsisten, masyarakat kepulauan selalu saja memiliki



banyak kendala tersendiri dalam memenuhi tingkat dan nilai kesetaraan terhadap akses dan partisipasi pada moment politik, baik dalam pemilihan umum maupun dalam ranah pengambilan kebijakan. Tidak terkecuali dengan masyarakat di Kepulauan Tanakeke yang memiliki 5 wilayah administratif desa sebagai tempat bermukim sekitar 6.500 jiwa penduduk. Kepulauan Tanakeke memiliki jumlah wajib pilih pada pilkada 2017 sebanyak 4.813 pemilih,¹⁵ Kepulauan Tanakeke meskipun mengalami perkembangan positif dalam peningkatan jumlah partisipasi pemilih namun secara statistik masih tergolong rendah dibanding wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Takalar.

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum adalah serangkaian kegiatan membuat keputusan yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Jikalau memutuskan untuk memilih, apakah memilih partai atau kandidat satu ataukah partai politik dengan kandidat lainnya. Keikutsertaan juga juga menentukan seberapa kuat legitimasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pejabat politik terpilih atas kebijakan administratif ataupun keputusan politik yang dikeluarkan. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih di daerah berlatar geografis kepulauan maka sudah menjadi tugas dari penyelenggara pemilu dalam mendesign sosialisasi pemilu yang sesuai dengan kondisi masyarakat daerah kepulauan. Kondisi diatas, dalam kajian tentang partisipasi

kat dalam pemilihan umum sangat ditentukan oleh perilaku

PU Kab. Takalar 2017



pemilih yang kemudian mendorong keengganan ataupun antusiasme masyarakat dalam menuntut hak politiknya sebagai warga Negara di dalam bilik-bilik suara.

Berdasarkan Latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sesuai dengan variable dalam dimensi psikologis dalam model Michigan yaitu:

1. Bagaimana ikatan emosional yang dibangun oleh pemilih dengan partai pengusung kandidat pada Pilkada Takalar tahun 2017?
2. Bagaimana orientasi masyarakat terhadap kandidat pada Pilkada Takalar tahun 2017?
3. Bagaimana orientasi masyarakat terhadap isu dalam pemilihan pada Pilkada Takalar tahun 2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah senantiasa diupayakan kearah terwujudnya tujuan yang diinginkan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana ikatan emosional yang dibangun oleh pemilih dengan partai pengusung kandidat dalam Pilkada Takalar tahun 2017;
2. Untuk menganalisis bagaimana orientasi masyarakat terhadap kandidat yang bertarung pada Pilkada Takalar tahun 2017;

Untuk menganalisis orientasi masyarakat terhadap isu yang berkembang pada Pilkada Takalar tahun 2017.



1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada semua pihak yang secara umum akan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritik dan Akademis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritik pada pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik khususnya penguatan pada teori-teori sosial politik yang menjadi dasar analisis penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritik dalam pengembangan kajian kepemiluan khususnya kajian tentang perilaku pemilih pada pelaksanaan pilkada sehingga terciptanya partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas sehingga pemimpin daerah memiliki legitimasi murni dan komprehensif dari masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat memahami dan mengkaji permasalahan perilaku pemilih dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada.
- b. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPU serta *stakeholders* lainnya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalamkaitannya dengan perilaku memilih



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan teoritis dan konseptual yang membantu proses penelitian ini, dalam rangka menghasilkan bangunan penelitian secara utuh yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan validitasnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Teori dan konsep yang dimaksud adalah: Perilaku Pemilih, yang memuat tentang pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Konsep masyarakat kepulauan serta konsep pemilu. Selanjutnya di bagian akhir diuraikan kerangka pemikiran dan uraian defenisi operasional yang penulis lakukan dalam melakukan penelitian.

2.1. Perilaku Pemilih

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin,¹⁶ selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 juga menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftarkan oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilihan dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.¹⁷

Istilah perilaku pemilih merupakan gabungan antara kata “perilaku”

“pemilih”. Dalam kamus ilmiah populer perilaku didefinisikan sebagai

ayat (22)
Ayat (1 dan 2)



tindakan; perbuatan; sikap.¹⁸ Perilaku menyangkut sikap manusia yang akan bertindak sesuatu. Oleh karena itu sangat masuk akal tampaknya apabila sikap ditafsirkan dari bentuk perilaku.

Studi tentang perilaku memilih merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis. Menurut Firmanzah (Efriza, 2012)¹⁹ secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.

Jack C Plano memposisikan perilaku pemilih sebagai suatu studi yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang mengapa mereka melakukan pemilihan itu.²⁰ Ramlan Surbakti mendefinisikan perilaku pemilih sebagai aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan untuk



¹⁸ Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994

¹⁹ Efriza, *Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta, Bandung, 2012. h.480

²⁰ Plano, et all, *Kamus Analisa Politik*, Cetakan Ketiga, PT. RajaGrafindo karta, 1994, h.280

memilih atau tidak memilih didalam suatu pemilihan umum, bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memutuskan memilih atau mendukung kandidat tertentu.²¹

Perilaku pemilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Untuk memahami kecenderungan perilaku pemilih, saat ini secara akurat kita bisa mengombinasikan dua pendekatan yang relevan. Pertama, pendekatan psikologi sosial. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai. Kedua, pendekatan rasional. Dalam pendekatan ini, kegiatan memilih dipandang sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Pertimbangan untung dan rugi terutama digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak.²²

Miriam Budiarto (2008) mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).²³ Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah



urbakti, *Partai, pemilu dan demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, h.170
Joko Widodo, *Demokratisasi Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. Hal 46-47
Miriam Budiarto, *Dasar-dasar ilmu politik*, Edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. Perilaku memilih bisa dikategorikan ke dalam dua besaran, yaitu:

- 1) Perilaku Memilih Rasional. Perilaku memilih ini, notabane disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal pemilih. Sehingga pemilih, disini berkedudukan sebagai makhluk yang independen, memiliki hak bebas untuk menentukan memilih partai atau kandidat mana pun. Dan sebagian besar mereka berasal dari internal pemilih sendiri, hasil berpikir dan penilaian terhadap objek politik tertentu.
- 2) Perilaku Memilih Emosional. Sementara untuk perilaku memilih ini, lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari lingkungan. Seperti factor sosiologis, struktursosial, ekologi maupun sosiopsikologi.

Perilaku pemilih dan partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan.²⁴ Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satu wujud dari partisipasi politik ialah kegiatan pemilihan yang mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; perilaku memilih (*voting behavior*) dan perilaku tidak memilih (*non voting*

r). David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama

on, Samuel P. dan Joan M. Nelson. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Pustaka. 2004. H.127



dalam menjelaskan perilaku non voting yaitu: pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih.²⁵

Ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, selama masa orde baru tidak ada pendidikan politik (*voters education*) atau peningkatan kualitas pemilihan. Kedua, perilaku memilih masyarakat kita masih tradisional, selain didasarkan ikatan emosional, juga dipengaruhi karisma dan tokoh. Hal itu berbanding terbalik dengan perilaku memilih masyarakat demokrasi modern. Perilaku memilih masyarakat lebih ditentukan isu yang diusung calon atau partai serta integritas, kredibilitas dan kapabilitas calon.²⁶

Adapun teori-teori Perilaku Pemilih yaitu :

- 1) *Party Identification Model*, teori perilaku pemilih yang paling awal , adalah *party-identification model*. Adalah teori yang berdasarkan kepada “*sense of psychological*” yang secara psikologis terikat dengan partai politik. Para pemilih dilihat sebagai orang yang mengidentifikasi dirinya dengan satu partai politik tertentu.
- 2) *Sociological Model*, pemilih cenderung mengadopsi pola-pola pemungutan suara dicerminkan oleh faktor ekonomi dan kedudukan sosialnya di mana ia berada, terutama dalam kelompoknya.



Arianto. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu“ Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan Vol. 1.No.1”. 2011. Hal 53
oko.Ibid. Hal 47-48

3) *Rational-Choice Model*, pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Oleh sebab itu yang menjadi pertimbangan adalah tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat memengaruhi hasil yang diharapkan.

Menurut Firmanzah,²⁷ ada tiga faktor determinan bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan pemilih, yakni: Pertama, Kondisi awal pemilih, ini dimaksudkan bahwa karakteristik yang melekat dalam diri pemilih. Setiap individu memiliki sistem nilai, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mewarisi kemampuan yang berbeda-beda pula. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi individu ketika mengambil keputusan politik. Kedua, faktor media massa yang mempengaruhi opini publik. Media massa yang memuat data, informasi dan berita berperan penting dalam mempengaruhi opini dimasyarakat. Demikian pula dengan pemaparan para ahli, iklan politik, hasil seminar, survey dan berbagai hal yang diulas dalam media massa akan menjadi pertimbangan pemilih. Ketiga, Faktor parpol atau kontestan, pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, ideologi dan kualitas para tokoh-tokoh parpol dengan pandangan mereka masing-masing. Dalam hal ini masyarakat lebih sering melakukan penilaian terhadap figur tokoh parpol, sekaligus menjadi barometer mereka dalam menilai parpol yang bersangkutan.



h, *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Obor, Jakarta, 2012.

Dalam memilih sebuah partai politik maupun kontestan, pemilih memiliki perilaku dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihannya. Menurut Firmanzah pada kenyataannya pemilih adalah dimensi yang sangat kompleks. Terkadang perilaku pemilih ini rasional dan non-rasional dalam menentukan keputusannya.²⁸ Perilaku pemilih yang terkadang rasional dan non rasional menjadikan pemilih memiliki karakter yang berbeda pada setiap pemilih. Selain itu pandangan pemilih dalam menentukan pilihan terhadap partai politik dan kontestan menjadikan karakter yang membedakan pada setiap pemilih. Sehingga pemilih memiliki peran yang berbeda-beda pula pada pemilihan umum.

Firmanzah menambahkan bahwa dalam diri masing-masing pemilih terdapat dua orientasi sekaligus yaitu; (1) *orientasi 'policy-problemsolving'*, dan (2) orientasi 'ideologi'. Ketika pemilih menilai partai politik atau seorang kontestan dari kacamata '*policy-problem solving*', yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja. Partai politik atau kontestan yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih. Sementara pemilih yang lebih mementingkan ikatan 'ideologi' suatu partai atau kontestan, akan lebih menekankan

spek subjektifitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama,

h, *Ibid*, h. 113



moralitas, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik atau calon kontestan, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya kepartai dan kontestan tersebut.²⁹

Firmanzah memetakan tipologi pemilih ke dalam empat kelompok, yaitu .³⁰

1. Pemilih Rasional. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ideologi kepada suatu partai atau seorang kontestan. Faktor seperti paham, asal-usul, nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografis memang dipertimbangkan juga, tetapi bukan hal yang signifikan. hal yang terpenting bagi jenis pemilih ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan, daripada paham dan nilai partai atau kontestan.
2. Pemilih Kritis. Pemilih jenis ini merupakan perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menuntaskan permasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis. Pentingnya ikatan ideologis membuat loyalitas pemilih terhadap sebuah partai politik atau seorang kontestan cukup tinggi dan tidak semudah '*rational voter*' untuk berpaling ke partai lain. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara system nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang akan dibuat. Pemilih jenis

harus di 'menege' sebaik mungkin oleh sebuah partai politik atau

n, *ibid*, h. 113-114

n, *ibid*, h.120-126



seorang kontestan, pemilih memiliki keinginan dan kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja partai, sementara kemungkinan kekecewaan yang bisa berakhir ke frustrasi dan pembuatan partai politik tandingan juga besar.

3. Pemilih tradisional. Pemilih dalam jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan social-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik. Biasanya pemilih jenis ini lebih mengutamakan figur dan kepribadian pemimpin, mitos dan nilai historis sebuah partai politik atau seorang kontestan. Salah satu karakteristik mendasar jenis pemilih ini adalah tingkat pendidikan yang rendah dan konservatif dalam memegang nilai serta paham yang dianut. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye, loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini.

Pemilih dalam hal ini lebih banyak menggunakan faktor nonrasional dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan suaranya.

Masyarakat lebih menekankan aspek yang mereka rasakan daripada pertimbangan logis. Dunia politik tidak seluruhnya bersifat rasional dan

Fanatisme pemilih atas suatu partai politik atau kandidat tidak dijelaskan dari sudut pandang rasional. Misalnya, sikap yang



bahkan rela mati demi suatu partai politik atau kandidat adalah sikap yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Padahal justru hal-hal seperti inilah yang seringkali kita temukan dalam kehidupan politik.

4. Pemilih Skeptis. Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga sebagai sesuatu penting. Keinginan untuk terlibat dalam sebuah partai politik pada pemilih jenis ini sangat kurang, karena ikatan ideologis mereka memang rendah sekali. Mereka juga kurang memedulikan program kerja atau 'platform' dan kebijakan sebuah partai politik. Dalam aspek tertentu, pemilih jenis ini lebih menonjolkan sikap pragmatisme, misalnya karena politik uang. Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak selalu dalam arti pemberian sejumlah uang kepada pemilih, tetapi bisa dalam bentuk-bentuk yang agak soft agar tidak dikesankan "membeli" suara seperti bantuan sembako, pembangunan masjid dan sebagainya.

Menurut Eep Saifullah Fatah dalam buku *political explorer*,³¹ secara umum pemilih dikategorikan kedalam empat kelompok utama, yaitu:

- 1) Pemilih Rasional Kalkulatif, pemilih tipe ini adalah pemilih yang memutuskan pilihan politiknya berdasarkan perhitungan rasional dan logika. Biasanya pemilih ini berasal dari golongan masyarakat yang terdidik atau relatif tercerahkan dengan informasi yang cukup sebelum

menentukan pilihannya.

iza.Op. Cit..hal. 487



- 2) Pemilih Primordial, pemilih yang menjatuhkan pilihannya lebih dikarenakan alasan primordialisme. Seperti alasan agama, suku, ataupun keturunan. Pemilih yang termasuk kedalam tipe ini biasanya sangat mengganggu simbol-simbol yang mereka anggap luhur. Pemilih tipe ini lebih banyak berdomisili diperkampungan.
- 3) Pemilih pragmatis, pemilih tipe ini biasanya lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan untung dan rugi. Suara mereka akan diberikan kepada kandidat yang bisa mendatangkan keuntungan sesaat secara pribadi kepada mereka. Biasanya mereka juga tidak begitu peduli dan sama sekali tidak kritis dengan integritas dan visi misi yang dibawa kandidat.
- 4) Pemilih emosional, kelompok pemilih ini cenderung memutuskan pilihan politiknya karena alasan perasaan. Pilihan politik yang didasari rasa iba, misalnya adalah pilihan yang emosional atau pilihan dengan alasan romantisme, seperti kagum dengan ketampanan atau kecantikan kandidat, misalnya juga termasuk kategori pilihan emosional. Kebanyakan mereka biasanya berasal dari kalangan hawa/ atau pemilih pemula.

Ada tiga teori besar yang menjelaskan mengapa seseorang tidak memilih ditinjau dari sudut pemilih ini adalah sebagai berikut : Pertama, teori sosiologis. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai

ari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan,



pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.

Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.

Ketiga, teori sosial ekonomi. Teori ini menyatakan keputusan untuk memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik, atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih.

Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya

isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang kandidat karena dianggap representasi dari agama atau



keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang selama ini menjadi basis dalam membaca perilaku pemilih yaitu *The Columbia Study*, *The Michigan Model*, dan *Rational Choice* (Bartels, 2012; Roth, 2008). Ketiga pendekatan tersebut lebih dikenal dengan istilah sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Selain itu, terdapat juga pendekatan berbeda yang dikembangkan oleh Lau dan Redlawsk (2006) yakni *rational choice*, *early socialization*, *fast and frugal*, dan *bounded rationality*. Dalam tulisan ini, hanya menguraikan secara singkat ketiga pendekatan pertama sebagai landasan memahami perilaku pemilih dalam kasus yang diteliti.

2.1.1 Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis ini dipelopori dan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan ilmu sosial dan ilmu politik dari Columbia's University Bureau Of Applied Social Science, sehingga terkenal dengan mashab Colombia (*The Columbia School of Electoral Behavior*).³²

Pendekatan sosiologis berasal dari Eropa Barat yang

ngkan oleh para ahli politik dan sosiologi. Mereka memandang

wati dalam Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Volume 2/Nomor 2/Desember



masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat hirarkis terutama berdasarkan status, karena masyarakat secara keseluruhan merupakan kelompok orang yang mempunyai kesadaran status yang kuat. Mereka percaya bahwa masyarakat sudah tertata sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya, maka memahami karakteristik sosial tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam memahami perilaku politik individu.³³

Perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis tersebut dipengaruhi oleh indikator sebagai berikut : (a) pendidikan, (b) jabatan / pekerjaan, (c) jenis kelamin, (d) Usia.³⁴ Menurut Seymour M. Lipset, yang dikutip Alwis (2001), karakteristik sosiologis pemilih dipengaruhi oleh beberapa kategori, yakni : pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status dan organisasi.³⁵

Menurut hasil penelitian yang pernah mereka lakukan, bahwa status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kelas sosial si pemilih), tempat tinggal (rural atau urban) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perilaku pemilih. Dengan demikian, teori perilaku pemilih sosiologis atau mashab Columbia menekankan bahwa faktor-faktor sosiologis memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang.



ffar. Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2005.

5
nal Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial ini misalnya berdasarkan umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang didalam organisasi keagamaan, organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun kelompok informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya. Ini merupakan sesuatu yang vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam bentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa keanggotaan seseorang kepada kelompok-kelompok sosial tertentu dapat mempengaruhi seseorang di dalam menentukan pilihannya pada saat pemilu. Hal ini tidak terlepas dari seringnya anggota kelompok, organisasi profesi dan kelompok okupasi berinteraksi satu sama lain sehingga timbulnya pemikiran-pemikiran untuk mendukung salah satu dari caleg yang mengikuti pemilu.

Gerald Pomper merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian voting behavior ke dalam 2 variabel yaitu predisposisi (struktur) sosial ekonomi pemilih dan keluarga pemilih. Apakah predisposisi politik ayah atau ibu akan berpengaruh pada preferensi politik



anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis dan sebagainya.³⁶

Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih nampaknya sangat mempengaruhi dimana nilai-nilai agama selalu hadir didalam kehidupan private dan public dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Dikalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas dasar kesamaan teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. Fenomena partai yang berbasis agama dianggap menjadi daya tarik kuat dalam preferensi politik.

Dalam literatur perilaku pemilih, aspek agama menjadi pengamatan yang penting. Pemilih cenderung untuk memilih partai agama tertentu yang sesuai dengan agama yang dianut. Di Indonesia faktor agama masih dianggap penting untuk sebahagian besar masyarakat. Dikutip Sulhardi (April 2008), Misalnya seorang muslim cenderung untuk memilih partai yang berbasis Islam dan sebaliknya seorang non-muslim cenderung untuk memilih partai non-muslim.

2.1.2 Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan sosiologis dan psikologis secara implisit atau eksplisit menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong. Dimana pendekatan tersebut beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibalik suara, tetapi sudah

dan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai.

h Zainuddin : 2006 : 47-48



Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural, identifikasi partai melalui proses sosialisasi, pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ini berarti variabel lain menentukan atau ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Ada faktor situasional yang ikut mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi bebas untuk bertindak. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang dicalonkan.

Perilaku pemilih tidak harus tetap atau sama, karena karakteristik sosiologis dan identifikasi partai dapat berubah-ubah sesuai waktu dan peristiwa-peristiwa politik tertentu. Dengan begitu, isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih (masyarakat) dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Pendekatan pilihan rasional mencoba menjelaskan bahwa kegiatan memilih sebagai kalkulasi untung dan rugi yang di pertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak

menentukan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat
negara. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk



membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.³⁷

Beberapa pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan di Negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih sebagaimana disebutkan oleh beberapa pendekatan diatas, tetapi dalam banyak hal justru ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin tertentu.

2.1.3 Pendekatan Psikologis

Psikologi adalah ilmu sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tingkah laku dan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan psikologi. (Sulhardi :2008)

Pendekatan psikologis ini dipelopori dan dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan dari University of Michigan's Survey Research Center, sehingga dalam teorisasi perilaku pemilih dikenal dengan *mashab Michigan's*.³⁸ Pendekatan ini muncul merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Secara metodologis, pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, seperti

na mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat

urbakti, *Partai, pemilu dan demokrasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, h.146
wati: 2004 : Volume 2. Op Cit.



pendidikan, agama, dan sebagainya. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelaskan perilaku pemilih. Disini para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya.

Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, menurut Greenstein ada 3 yakni:³⁹

- 1) Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.
- 2) Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan.
- 3) Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri.

Namun, sikap bukanlah sesuatu hal yang cepat terjadi, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, yakni mulai dari lahir sampai

Pada tahap pertama, informasi pembentukan sikap berkembang

Greenstein, *Personal and Politics* (Chicago: Morkham Publishing, 1969).



dari masa anak-anak. Pada fase ini, keluarga merupakan tempat proses belajar. Anak-anak belajar dari orangtua menganggap isu politik dan sebagainya. Pada tahap kedua, adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat dewasa ketika menghadapi situasi di luar keluarga. Tahap ketiga, bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, gereja, partai politik dan asosiasi lain.

Melalui proses sosialisasi ini individu dapat mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik di dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pemilih.

Teori perilaku pemilih psikologis atau mashab Michigan lebih menekankan bahwa perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh relasi tiga aspek psikologis antara manusia dengan aspek-aspek pemilu antara lain :

- 1) Keterkaitan seseorang dengan partai politik,
- 2) Orientasi seseorang terhadap isu-isu,
- 3) Orientasi seseorang terhadap kandidat.

Dengan demikian, partai politik, isu dan kandidat merupakan variabel independen dalam menjelaskan perilaku pemilih dalam suatu pemilu.⁴⁰

Model psikososial berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat

Survei di Universitas Michigan selama pemilihan presiden AS

wati: 2004 : Volume 2. Op Cit.



1948, hasilnya dianalisis oleh Campbell dan Kahn (1952) dalam *The People Elect a President*; pemilihan laporan 1952 dipresentasikan oleh Campbell, Gurin dan Miller (1954) dalam *The Voter Decides*; dan pemilihan umum pada tahun 1956, di mana hasilnya, dikombinasikan dengan yang diperoleh dalam penyelidikan sebelumnya, telah mengarah ke buku *The American Voter*, yang ditulis oleh Campbell, Converse Miller dan Stokes (1960). Karya-karya ini menandai awal dari serangkaian studi panjang yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Survei dan baru-baru ini oleh Pusat Studi Politik di University of Michigan, yang meluas hingga hari ini, meskipun saat ini berada di bawah *American National Electoral Studies* (ANES), investigasi yang melibatkan berbagai lembaga yang lebih besar, mempertahankan dasar teoritis awal.

2.3.1.1. Keberpihakan (partisanship/Party ID)

Konsep sentral dari model perilaku pemilihan ini adalah keberpihakan, yang dirancang sebagai afinitas psikologis, hubungan yang stabil dan langgeng dengan partai politik yang tidak perlu diterjemahkan ke dalam hubungan konkret, yaitu pendaftaran, atau pemilihan secara konsisten dan militansi sistematis dengan partai ini

Dalam mengkarakteristikan hubungan individu dengan pihak sebagai identifikasi psikologis, kami menggunakan konsep yang memainkan peranan penting jika agak bervariasi dalam teori-teori psikologi tentang hubungan individu dengan individu atau individu terhadap kelompok. Kami menggunakan konsep di sini untuk mengkarakterisasi orientasi afektif individu ke objek grup penting di lingkungannya. Baik teori kelompok referensi dan penelitian pengaruh kelompok kecil telah menyatu pada kualitas menarik atau memukul mundur kelompok sebagai dimensi



umum yang paling penting dalam mendefinisikan hubungan individu-kelompok, dan ini adalah dimensi yang akan kita sebut identifikasi (*Campbell, Converse*). ,

Gagasan partisan, diperkenalkan dalam studi perilaku voting oleh Campbell et al. (1960), dipengaruhi oleh konsep kelompok referensi (Hyman & Singer, 1968) dan memiliki kesamaan dengan gagasan sosialisasi antisipatif yang diperkenalkan oleh Merton dan Kitt (1950) untuk menentukan situasi di mana individu memilih kelompok referensi yang mereka tidak termasuk dan mulai bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai aturan kelompok itu. Menurut penulis ini, keberpihakan diperoleh melalui proses sosialisasi, dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sikap keluarga, kolega dan teman sebaya, sebuah proses yang Miller dan Shanks (1996) dianggap mirip dengan yang mengarahkan subyek untuk mengidentifikasi dengan agama. Hubungan emosional ini yang tunduk pada partai politik "mereka" dapat dicapai dengan berbagai tingkat keterlibatan dalam suatu proses yang analog dengan apa yang terjadi dengan hubungan individu dengan agama, yang dimanifestasikan dengan cara yang berbeda seperti pergi dari non-agama ke agama yang mendalam. Dalam perspektif ini, keberpihakan adalah bentuk asli dari identifikasi sosial di mana "warga negara memiliki rasa abadi tentang orang macam apa yang dimiliki oleh berbagai pihak dan apakah mereka mengidentifikasi dengan kelompok sosial ini" (Green, Palmquist, &

r, 2002, hal. ix)



Khususnya, model ini juga tidak cocok keberpihakan dengan pilihan pemilih. Pemisahan antara sifat psikologis keberpihakan dan sifat obyektif dari perilaku memilih tercermin, dalam istilah metodologis, dalam pilihan untuk tidak mengukur variabel ini dari pemungutan suara yang sebenarnya dari subjek, tetapi melalui pemosisian diri mereka: "Secara umum, lakukan Anda menganggap diri Anda sebagai Republikan, Demokrat, Independen, atau apa? ", diikuti oleh yang lain yang meminta subjek untuk mengklasifikasikan kekuatan identifikasi ini: "Apakah Anda menyebut diri Anda kuat (Republikan, Demokrat) atau tidak sangat kuat (Republikan, Demokrat)? ". Mereka yang mengklasifikasikan diri sebagai Independen juga ditanya apakah, terlepas dari status independen mereka, mereka menganggap diri mereka dekat dengan salah satu pihak "Apakah Anda menganggap diri Anda lebih dekat dengan Partai Republik atau Demokrat?" (Campbell, Converse, Miller, & Stokes , 1960, hal. 122).

Dalam perspektif ini, keberpihakan tidak dilihat sebagai variabel yang memberitahu kita secara langsung dan tidak ambigu yang merupakan pilihan suara dari seorang pemilih. Campbell et al. (1960) menggambarkan keberpihakan sebagai filter perseptual melalui mana pemilih menghargai apa yang menguntungkan untuk orientasi partainya dan mengabaikan atau mendevaluasi apa yang tidak menguntungkan.

Dengan mempertimbangkan bahwa kehidupan politik dalam masyarakat

atis hampir secara eksklusif terfokus pada pihak-pihak dan
at bahwa evaluasi proposal kebijakan mensyaratkan, dalam



banyak hal, pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki oleh warga, keberpihakan menjadi suatu variabel sentral dalam pengalaman politik dari para pihak. subyek berfungsi sebagai instrumen "membaca" dari pemilihan dan proposal kandidat

Secara teoritis, *partisanship* dibangun dalam 3 preposisi yang dalam menganalisis ikatan emosional pemilih dengan partai, orientasi pemilih terhadap kandidat dan orientasi pemilih terhadap isu, yaitu :

1. Dalam dimensi membangun ikatan emosional, Pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas (identifikasi partai) yang dibentuk oleh pengalaman sepanjang hidup dan untuk waktu yang sangat lama. Kondisi ini hanya memungkinkan jika pemilih memiliki sikap dan orientasi politik dan pengetahuan yang tinggi mengenai landasan partai tertentu. ini secara sederhana dapat dimaknai sebagai massa ideologis dimana contoh konkritnya adalah
 - a. pemilih PKS pada masa awal reformasi yang memilih karena dorongan agama yang secara ideologis bersinergi dengan platform dan gerakan partai
 - b. Pemeluk katolik di amerika serikat cenderung memilih partai berhaluan konservatif
 - c. massa marhaen yang terafiliasi dengan PDI pada masa orde baru.
 - d. seorang berideologi sosialis cenderung memilih partai Komunis

ntasi terhadap kandidat bukan pada karakteristik figur tertentu
linkan prospek ideologis yang didapatkan dengan memilih



kandidat tertentu dimana kandidat mempengaruhi pilihan suara dalam dua cara: langsung dan tidak langsung

- a. Secara langsung : bahwa kandidat dipilih karena pertimbangan moralitas kolektif maksudnya adalah secara figur, kandidat dipilih karena menjanjikan kesan yang secara moral mampu diterima oleh masyarakat (contohnya adalah : masyarakat yang agamis hanya memilih figur yang agamis karena menjanjikan pola kepemimpinan agamis)
- b. Secara tidak langsung karena 3 hal yaitu,
 - i. pengaruh dari pimpinan partai, (siapa yang menjadi tokoh partai)
 - ii. reaksi positif dan negative dari kebijakan petahana. (masyarakat yang merespon negatif petahana cenderung memilih kandidat dengan karakter yang berlawanan) contohnya, kesan Lamban, tidak tegas dan kurang merakyat yang muncul sebagai penilaian masyarakat terhadap SBY pada akhir kepemimpinannya membuat popularitas jokowi (responsif dan merakyat) dan prabowo (tegas dan bertanggungjawab) meroket
 - iii. komposisi actor dalam koalisi (komposisi figur dalam koalisi menentukan reaksi masyarakat. Ada keraguan dalam diri voter jika salah satu tokoh koalisi secara moral di tolak. Atau menjadi militan saat semuanya diterima



3. secara moril pemilih akan memilih isu yang membuat dirinya merasa aman secara psikologis dan cenderung memilih berdasarkan dengan prioritas kebijakan yang dilakukan kedepan dimana Ada 2 tipe isu yang memengaruhi pemilih yaitu isu moral dan isu kebijakan
- a. Apakah kebijakan dari kontestan memiliki dampak ideologis bagi pemilih. contohnya dalah isu jika Azis Kahar terpilih sebagai gubernur sulsel maka syariat islam akan diberlakukan di toraja yang mayoritas pemilihnya adalah non muslim, membuat suaranya turun drastis di daerah tersebut. Atau isu tenaga kerja asing mempengaruhi peningkatan suara donald trump yang berjanji untuk lebih memaksimalkan tenaga kerja dari kulit putih)
 - b. Persepsi pemilih mengenai perbandingan perbedaan kandidat dalam kebijakan untuk masalah yang sama mempengaruhi pemberian suara. (contoh: dalam isu investasi asing, jokowi akan tunduk kepada asing sementara prabowo tidak akan)

2.1.3.2. Saluran Kausalitas

Model penjelasan hubungan antara variabel yang terlibat dalam definisi perilaku pemilu disebut corong kausalitas. Metafora ini mewakili rantai peristiwa yang berkontribusi pada pemungutan suara subyek, membedakan faktor distal (faktor sosial ekonomi dan historis, nilai dan sikap dan kelompok keanggotaan) dan faktor proksimal (isu, kandidat,

ye pemilu, situasi politik dan ekonomi, tindakan pemerintah, h teman-teman). Di pintu masuk corong adalah karakteristik



sosiologis dan sosial yang mempengaruhi elemen berikutnya dari urutan ini yang keberpihakan. Keikutsertaan, pada gilirannya, merupakan peran yang menentukan dalam mengevaluasi kandidat, masalah, insiden kampanye yang dilaporkan di media dan percakapan yang dilakukan pemilih dengan keluarga dan teman tentang pemilihan. Output dari corong ini adalah suara. Skema ini menjelaskan peran sentral keberpihakan sebagai akibat dari kombinasi faktor disposisional dan jangka panjang dan sebagai faktor yang memoderasi pengaruh variabel jangka pendek pada perilaku memilih.

Memikirkan sebuah corong dengan cara ini sangat memperbesar tugas penjelasan kita, karena dalam kasus yang ideal kita ingin melakukan pengukuran yang mengacu pada menyatakan tidak pada satu bagian melintang saja, tetapi dalam jumlah besar. Setiap penampang berisi semua elemen yang akan berhasil memprediksi yang berikutnya, dan seterusnya, sampai kita tiba pada tindakan terakhir (Campbell et al., 1960)

Meskipun model mencakup semua faktor ini, ia memfokuskan perhatiannya pada hubungan keberpihakan, kandidat dan masalah dan kurang pada faktor sosial dan sistem komunikasi (Niemi & Weisberg, 2001).

2.1.3.3. Faktor proksimal dan distal

Model kausal yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa perubahan dalam faktor jangka panjang yang dapat menyebabkan perubahan dalam identifikasi partai pemilih. Secara umum faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh model adalah pendekatan sosiologis yang diaktualisasikan sebagai determinan perilaku memilih. Menurut



Campbell et al. (1960) perubahan dalam identifikasi partai jarang terjadi dan terjadi sebagai reaksi terhadap peristiwa-peristiwa yang berdampak besar. Temuan studi menunjukkan bahwa perubahan dalam identifikasi partai terjadi pada tingkat individu ketika ada penyesuaian dalam status sosial subjek (misalnya, masuk ke lembaga pendidikan tinggi, pernikahan, perubahan area tempat tinggal, perubahan pekerjaan, dll.) atau ketika perubahan terjadi di bidang organisasi sosial dan politik yang lebih luas, (misalnya, berakhirnya rezim fasis di Portugal, masuk ke Uni Eropa; akhir Uni Soviet, dll.). Seperti yang bisa kita lihat, dalam kedua kasus perubahan ini relatif jarang dan, meskipun perubahan dalam status sosial individu terjadi dalam jumlah yang lebih besar dan dengan lebih banyak ketekunan, efek pada perubahan dalam keberpihakan lebih cepat dan memiliki dampak pemilihan yang lebih banyak ketika terjadi di struktur politik dan / atau sosial, seperti dampak akhir Uni Soviet dalam ekspresi elektoral partai-partai komunis di Eropa selatan.

Jika perubahan dalam faktor sosial dapat menghasilkan perubahan jangka panjang dalam keberpihakan, faktor jangka pendek dipandang hanya mampu mengubah pilihan pemilihan subjek dalam pemilihan yang diberikan, tanpa mempengaruhi keberpihakan mereka (Campbell, Converse, Miller, & Stokes , 1960, Green & Palmquist, 1990). Hubungan antara keberpihakan dan faktor-faktor jangka pendek diwujudkan melalui

terhadap proposal kebijakan, kandidat, dan manfaat kelompok (Campbell dan Miller, 1987). Namun, sementara keberpihakan memengaruhi



persepsi variabel situasional, juga mungkin bahwa proposal, pidato, atau kandidat sangat bertentangan dengan harapan, nilai atau kepentingan pemilih, bahwa situasi ini tidak mungkin dibentuk oleh filter perseptual ini. dan membawa subjek untuk tidak memilih atau bahkan memilih pihak lain. Menurut asumsi model, ini tidak akan mempengaruhi keberpihakan yang akan berlanjut, meskipun ketidaksetiaan yang mendalam ini, untuk mempertahankan identifikasi mereka sebelumnya.

Peran keberpihakan telah, bagaimanapun, diperebutkan sejak perumusannya di tahun 60-an, tidak hanya berdasarkan kesulitan dalam menerapkannya ke sistem pemilu yang pada dasarnya bukan bi-partisan, seperti halnya di sebagian besar negara Eropa Barat (Budge, Crewe&Farlie, 1976) tetapi terutama dengan argumen bahwa ada pelemahan progresif dari hubungan individu ke partai politik di AS (Nie, Verba, & Petrocik, 1976, Stanley & Niemi, 1991; Stanley & Niemi, 2000) dan di Eropa (Crewe & Denver 1985; Dalton, 1984; Dalton, 2000; Dalton, Flanagan& Beck, 1984, Schmitt & Holmberg 1995), yang mempertanyakan tesis stabilitas partisan dan menunjukkan ketidaksejajaran progresif pemilih dalam kaitannya dengan partai politik. Cara model memahami hubungan antara faktor-faktor psikososial dan keberpihakan ditantang oleh para peneliti yang percaya bahwa model Michigan melebih-lebihkan peran loyalitas partisan jangka panjang

Flanagan, & Beck, 1984; Dalton, 2000, Fiorina 1981; Franklin, & Valen, 1992; Kiewiet, 1983; Wattenberg, 1994).



Secara umum, semua kritik dari model psikososial ini berfokus pada kesulitan yang ditunjukkan oleh pendekatan teoretis ini dalam menjelaskan alasan mengapa beberapa pemilih yang mengidentifikasi dengan suatu pihak - sebuah proses yang memiliki hubungan emosional yang mendasari di alam dan akibatnya, kesetiaan adalah sangat penting. - memilih partai lain atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Bagi para peneliti ini adalah faktor proksimal yang memainkan peran yang menentukan dalam misalignment pemilih dan volatilitas konsekuensi yang mencirikan demokrasi Barat sejak awal 1960-an. Dalam perspektif ini, pemilih menyesuaikan hubungan mereka dengan partai politik sesuai dengan evaluasi yang mereka buat, dalam setiap pemilihan, kondisi ekonomi dan bagaimana partai-partai dan para pemimpin mereka berurusan dengan mereka. Identifikasi partai bekerja, paling baik, hanya sebagai jalan pintas kognitif - dan bukan sebagai identitas sosial - yang memungkinkan pemilih untuk mengatasi informasi tambahan yang diperlukan untuk meninjau semua proposal, tanpa menyiratkan adanya hubungan afektif dan emosional antara pemilih dan politik ini. pesta.

Kritik ini, secara umum, disajikan oleh penulis yang berpendapat bahwa penjelasan tentang perubahan dalam pemilihan suara pemilih harus dicari bukan melalui penggunaan variabel psikososial tetapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan pemrosesan

si dan rasionalitas pemilih dan politik dan sistem pemilihan. Pada



bagian berikut kami menyajikan model teoretis yang mengarah pada pendekatan ini

2.2 Patrimonialisme Politik

Patrimonialisme sesungguhnya merupakan bentuk kepemimpinan authoritarian, diktator, dimana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi pemimpin negara (personal rule). Pemimpin negara memposisikan diri diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan kepada kerabat dan kroni dekatnya. Seringkali menggunakan kekerasan guna mempertahankan posisi kepemimpinannya. Pemerintahan patrimonial bersandarkan diri pada tiga unsur yang membuatnya jadi pemerintahan tradisional dan belum mencapai tahap birokratis dan modern. (Michels, 1984).

1. Klientisme/ Patron-Klien

Istilah ini merujuk pada hubungan kekuasaan yang dibangun oleh penguasa dan lingkungan sekitarnya. Dalam politik modern, pusat loyalitas ada pada impersonal order (hukum). Namun, dalam klientisme, loyalitas ada pada pribadi penguasa.

Istilah “patron” berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh” (Usman, 2004: 132). Sedangkan “klien” berarti “bawahan” atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Selanjutnya, pola

an patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan,



maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior).

Atau dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (Scott, 1983: 14 dan Jarry, 1991: 458). Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan bapak-anak buah, di mana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun sebuah keluarga besar atau extended family (Jackson, 1981: 13-14). Setelah itu, bapak harus siap menyebar luaskan tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal, tidak ideologis dan pada dasarnya juga tidak politis.

Pada tahap selanjutnya, klien membalas dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan kepada patron (Scott, 1993: 7-8 dan Jarry, 1991: 458). Hubungan patron-klien itu sendiri telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pendapat yang hampir serupa juga diketengahkan oleh Palras, dimana menurutnya hubungan patron-klien adalah suatu hubungan yang tidak setara, terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat dengan sejumlah pengikutnya (Palras, 1971: 1). Lebih lanjut, Palras mengungkapkan bahwa hubungan semacam ini terjalin berdasarkan atas pertukaran jasa, dimana

tungan klien kepada patronnya dibayarkan atau dibalas oleh dengan cara memberikan perlindungan kepada kliennya



Dalam politik modern, wilayah publik dan pribadi sangat terpisah. Segala urusan sang pemimpin, di luar urusan rumah tangga pribadi, ada dalam wilayah publik. Karena berada di wilayah publik, urusan itu harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan, dan pertanggungjawabannya mesti transparan. Sedangkan dalam pemerintah patrimonial, batas wilayah publik dan pribadi dibuat kabur. Bantuan uang dari luar negeri, misalnya, yang seharusnya berada dalam wilayah publik, dimasukkan ke wilayah pribadi, tanpa keterbukaan dan tanpa pertanggungjawaban.

Politik modern berkembang dalam kultur yang rasional, yang sumber informasi dan validitasnya dapat diverifikasi dalam dunia yang nyata. Sedangkan corak pemerintahan patrimonial mengembangkan kultur nonrasional, dalam segala bentuk mistisisme ataupun kultus individual. Dalam politik modern, sang penguasa ditampilkan sebagai politisi biasa yang menang pemilu. Sedangkan dalam corak patrimonial, penguasa diberi bobot mistik yang lebih kuat. Ia digambarkan memiliki kekuatan supernatural tertentu, atau keturunan sebuah dinasti atau moyang yang mahasakti atau kaliber seorang wali. Dengan mistisisme itu, loyalitas kepada pemimpin menjadi lebih dalam. Bahkan, informasi yang menjadi landasan kebijakan publiknya sebagian dianggap turun dari kahyangan, yang tak dapat diverifikasi di dunia nyata.

2. Patrimonialisme Politik dalam Demokrasi

Patrimonialisme politik adalah istilah untuk menyebut rezim pemerintahan dimana kekuasaan penguasa tergantung pada kecakapan



untuk mempertahankan kesetiaan para elit kelompok. (Philipus, 2009).² Kekuasaan politik dalam pemerintahan patrimonial dipertahankan melalui cara bagaimana seseorang mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya. Jika demokrasi selalu di asosiasikan sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sebagaimana di ungkap oleh Abraham Lincoln pada abad XVIII,

Maka rakyat dalam pemerintahan patrimonial tak ubahnya hanya menjadi sapi perah (klien) untuk kepentingan elit politik tertentu dalam mencapai tujuannya. Demokratisasi politik di atas hanya berlangsung secara prosedural dimana kekuasaan berlangsung dan dipertahankan melalui cara dan pola tertentu hanya sebagai alat tujuan untuk kepentingan kelompok atau individu. Fenomena tersebut jelas telah kehilangan identitasnya makna yang sebenarnya, menguatnya fenomena politik transaksional tidak saja telah meruntuhkan legitimasi demokrasi namun mengubah wajah demokrasi hanya merupakan alat untuk kepentingan kelompok tertentu. Meski Robert Dahl, menyebut tiga prinsip utama pelaksanaan demokrasi, yakni (1) kompetisi, (2) partisipasi, dan (3) kebebasan politik dan sipil. Kompetisi harus dibingkai dalam proses yang sehat dan luas di antara individu serta dalam kelompok-kelompok organisasi untuk mencapai kekuasaan pemerintahan, secara periodik dan persuasif. (Keith R, 1983).



2.3 Masyarakat Kepulauan

Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi” masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Tetapi hendaknya diperhatikan bahwa tidak semua manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat karena suatu masyarakat harus mempunyai ikatan yang khusus. Ikatan yang membuat kesatuan manusia itu menjadi suatu masyarakat yaitu pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Pola tersebut juga harus bersifat mantap dan kontinyu dengan perkataan lain, pola khas tersebut harus sudah menjadi adat istiadat yang khas.⁴¹

Adapun pengertian masyarakat menurut beberapa ahli :⁴²

- a. Menurut Auguste Comte, mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan-perkembangan yang tersendiri.
- b. Selo Soemardjan mengatakan, bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menaghasilkan kebudayaan .
- c. Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat

nu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

ningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta. 2000 hal 143
Pengantar Sosiologi. Bogor : Ghalia Utama. 2005. Hal 39-40



Kecuali ikatan adat-istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan serta suatu kontinuitas dalam waktu, suatu masyarakat manusia harus juga mempunyai cirilain, yaitu suatu rasa identitas di antara para warga atau anggotanya, bahwa mereka merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya.⁴³

Pitrim A. Sorokin, pernah mengatakan bahwa sistem lapisan masyarakat merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Menurut Pitrim A. Sorokin Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas rendah. Bentuk-bentuk lapisan masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Lapisan-lapisan tersebut tetap ada, sekalipun dalam masyarakat kapitalis, demokratis, komunistis, dan lain sebagainya.⁴⁴ Lapisan masyarakat tersebut memiliki banyak bentuk-bentuk konkret. Akan tetapi, secara prinsipil bentuk-bentuk tersebut dapat dikalsifikasikan kedalam tiga macam kelas, yaitu yang ekonomis, politis, dan yang berdasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Umumnya ketiga bentuk pokok tadi mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya, di mana terjadi saling mempengaruhi.⁴⁵

Secara sosial budaya ekonomi masyarakat kepualaun memiliki ciri-ciri sebagai berikut:



ningrat. Op. Cit. Hal146
o Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Grapindo Persada. 2006. Hal 197-198
199

1. Pulau-pulau kecil ini ada pulau yang berpenghuni dan sebagian ada yang tidak berpenghuni.
2. Penduduk asli mempunyai budaya dan kondisi sosial ekonomi yang khas.
3. Kepadatan penduduk yang menempati pulau ini sangat rendah. Hal ini disebabkan karena daya dukung pulau dan air tanah yang terbatas.
4. Ekonomi lokal pada perkembangannya sangat tergantung ekonomi dari luar pulau induk atau kontinen.
5. Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia.
6. Aksesibilitas (ketersediaan sarana prasarana) rendah dengan transportasi maksimal 1 kali sehari, di samping faktor jarak dan waktu yang terbatas. Jika aksesibilitanya tinggi maka keunikan pulau lebih mudah terganggu.

Kepulauan atau pulau kecil merupakan pengertian yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Selain dari segi social budaya, memiliki kriteria secara fisik dan ekologis, Terpisah dari pulau besar. Secara fisik kepulauan memiliki karakteristik:

1. Dapat membentuk satu gugus pulau atau berdiri sendiri.
2. Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hidroklimat laut.
3. Luas pulau kurang dari 10.000 km², dan sangat rentan terhadap perubahan alam atau manusia seperti : bencana angin badai,

ombang tsunami, letusan gunung berapi, fenomena penggelaman karena kenaikan permukaan air laut (*sea level rise*).



Secara ekologis memiliki karakteristik :

1. Ekosistem pulau-pulau kecil cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi dibanding proporsi ukuran pularnya.
2. Memiliki resiko perubahan lingkungan yang tinggi. Perubahan ini bisa terjadi karena pencemaran dan atau kerusakan akibat aktivitas transportasi laut, aktivitas penangkapan ikan, akibat bencana alam seperti gempa, gelombang, tsunami, penambangan.
3. Memiliki keterbatasan daya dukung berdasar indikator ketersediaan air tawar dan produksi dari tanaman pangan.
4. Melimpahnya biodiversitas laut

2.4 Konsep Pemilu

Pemilihan umum sering disebut juga dengan "Political Market", artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partaipolitik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih. Setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio fisual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk face toface (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampaian

menegenai program, platform, azas, idiologi serta janji-janji politik guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat



menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Pemilu dalam pandangan minimalis merupakan proses pengambilan kebijakan umum, mempunyai makna penting, yaitu merupakan proses terbaik dibanding, misalkan sistem kariratau pengangkatan untuk menentukan pemimpin politik, kemudian, memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor baru masuk kedalam arena kekuasaan, dan memungkinkan partisipasi rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka. (Sutoro eko, 2006) Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga, yaitu :

- a) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
- b) Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat

terjamin.



c) Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa “Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴⁶ Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Sutoro Eko (2006) mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis (kompetitif, liberal, dan partisipatif) membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan idiologi dan program partai.

Sementara itu, Eep Syaepulah Fatah mengatakan bahwa pemilu yang demokratis harus memiliki dua syarat; yaitu: (1) Ada pengakuan terhadap hak pilih universal, semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifat politik dan ideologis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. (2) Ada keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat.

Beberapa azas pemilihan umum yang ditetapkan berdasarkan

Undang pemilu yang berlaku di Indonesia adalah :

ayat (1)



- a) Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut aspirasi dan hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan
- b) Umum, artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih, dan untuk yang berusia 21 tahun berhak untuk dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian)
- c) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapaun/dengan apapun.
- d) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot)
- e) Jujur, artinya, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara, pemerintah, peserta pemilu, masyarakat, pengawas dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Adil, artinya, dalam penyelenggaraan pemilu, semua pihak, baik peserta pemilu maupun pemilih harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.5 Penelitian Terdahulu



Sebenarnya telah banyak penelitian terdahulu tentang perilaku politik dalam pemilihan baik di Indonesia maupun di Negara-

negara lain. Mulai dari level lokal sampai pemilihan kepala Negara. Namun mengingat kajian tentang perilaku masyarakat yang berbeda disetiap zaman, lokasi, kebudayaan dll serta perbedaan sistem kepemiluan masing-masing Negara, menjadikan kajian tentang perilaku pemilih senantiasa relevan untuk dilakukan dalam setiap konteks kepemiluan. Pendek kata tidak ada klaim teoritis dan universal terhadap perilaku pemilih. Namun berikut beberapa penelitian tentang perilaku masyarakat :

1. Bambang Kuncoro (1998), yang dilakukan di desa Sunyalangu Kabupaten Banyumas menemukan bahwa karakteristik sosiologis, subkultur aliran dan identifikasi partai cukup relevan untuk menjelaskan perubahan perilaku pemilih warga Desa Sunyalangu dalam menentukan OPP (Organisasi Peserta Pemilu) kecenderungan pemilih OPP lebih besar karena ajakan tetangga daripada program yang ditawarkan OPP. Faktor alasan sosiologis berpengaruh besar dalam perilaku pemilih masyarakat.
2. KIP Kab. Aceh Singkil (2015), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kab. Aceh Singkil. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang secara nyata dan signifikan berpengaruh terhadap keputusan untuk memilih dalam pemilu

legislatif tahun 2014 adalah Pekerjaan dari caleg dan Kedekatan personal dengan caleg.



3. KIP Kab. Bener Meriah (2015), Perilaku Memilih (Voting Behaviour) Masyarakat Kab. Bener Meriah Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Faktor Figur/citra dari calon merupakan faktor yang memberikan pengaruh cukup besar bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Dari analisis data primer dan data sekunder terkait dengan pilihan yang rasional dalam memilih, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat rasionalitas memilih masyarakat Kabupaten Bener Meriah pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sudah relatif tinggi.
4. Udin Hamin, (2004), pemilih etnis di Kota Tidore Kepulauan menjelaskan bahwa rasionalitas, pertimbangan program partai, identifikasi partai, budaya dan lingkungan sosial berpengaruh kuat terhadap perilaku pemilih kepala daerah pada masyarakat.
5. Laporan Riset Perilaku Pemilih Di Kabupaten Barru. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Sulawesi Selatan (2015), Untuk Mengentahui Faktor Yang Menentukan Perilaku Pemilih Di Kab. Barru. Kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan peneliti adalah : 1. Pendekatan sosiologis, tidak sedikit pemilih yang menunjukkan model perilaku memilih ini dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Dimana adanya factor kesamaan daerah masih mempengaruhi perilaku

ilih terhadap seorang kandidat. 2. Pendekatan psikologis, dalam penelitian ini pemilih menunjukkan perilakunya dengan



mengidentifikasi kandidat dengan penilaian dan sikap. Hal itu, disebabkan adanya keterkaitan atau saling berhubungan antara faktor sosiologis dan psikologis. 3. Pendekatan pilihan rasional, pemilih yang menunjukkan model pilihan rasional dalam penelitian ini adalah mereka yang memilih seorang kandidat dengan melihat program yang ditawarkan kandidat tersebut. Selain melihat program yang ditawarkan juga melihat prestasi, keberhasilan, serta kapasitas kepemimpinan yang dimiliki dari seorang kandidat.

6. KPU Bondowoso Dan Lembaga Penelitian Universitas Jember (2015), Secara umum, kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan memotret perilaku memilih masyarakat Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor rasionalitas, seperti visi, misi, program maupun isu yang diangkat oleh partai, calon presiden, calon bupati, bahkan mengenai rasionalitas material (uang dan materi) sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat Bondowoso.
7. Darussalam, (2004), faktor psikologis sangat besar peranannya untuk menjelaskan perilaku pemilih di Indonesia. Sedangkan faktor sosiologis dan faktor rasional tidak terlihat dampaknya terhadap perilaku pemilih di Indonesia
8. Tri Setya Puspasari (2011) dengan judul Faktor-faktor yang

berpengaruhi perilaku pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi Banten tahun 2011 di kecamatan Karawachi kota



Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kandidat mempunyai pengaruh tertinggi dalam perilaku pemilih, karena pemilih melihat kandidat dari citra suatu kandidat.

9. Humanika Institute Wonosobo & KPU Kab. Wonosobo (2015), Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 2014 - Studi Perilaku Memilih Masyarakat Wonosobo Pada Pemilu 2014. Hasil dari penelitian ini adalah dimana perilaku pemilih yang terwujud dalam bentuk partisipasi masyarakat dengan segala bentuknya kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang berdiri sendiri (otonom) yang tidak berhubungan dengan pihak lain. Faktanya justru perilaku pemilih (masyarakat) ditentukan secara mutlak oleh peserta pemilu baik individu calon anggota legislatif, platform partai bahkan juga ditentukan oleh pragmatisme politik dengan janji-janji materi dari para kontestan Pemilu.

10. Tim Peneliti JARI Indonesia Borneo Barat (2015). Analisis Pemahaman Dan Perilaku Politik Masyarakat Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku sosial masyarakat, serta mendeskripsikan proses perilaku sosial dalam mempengaruhi pemahaman dan perilaku politik masyarakat dan mengidentifikasi perilaku politik masyarakat, serta

deskripsikan bagaimana perilaku politik dapat mendorong ataupun menghambat tingkat partisipasi pemilih. Penelitian yang dilakukan



pada dua lokasi sampel berbeda menunjukkan karakteristik perilaku sosial, perilaku politik, dan perilaku memilih yang berbeda pada masing-masing tempat. Faktor utama yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah tingkat heterogenitas masyarakat dalam lingkungan yang sama. Di Desa Teluk Empening, masyarakat memiliki banyak kesamaan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam membangun interaksi dengan pihak lain. Sedangkan pada Desa Sui Raya Dalam, lingkungan tempat tinggal dapat dihuni oleh individu-individu yang berbeda identitas. Akibatnya, sikap individualis lebih ditonjolkan dan diekspresikan dengan membatasi interaksi dengan pihak lain selain dalam lingkungan rumah tangga. Perilaku sosial yang ada pada diri masing-masing kelompok individu di dua tempat yang berbeda berakibat pada berbedanya pemahaman dan perilaku politik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok individu di Desa Teluk Empening lebih sensitif dan sadar terhadap isu-isu lokal. Berbeda halnya dengan kelompok individu di Desa Sui Raya Dalam yang lebih heterogen. Terbatasnya interaksi dengan pihak lain mengakibatkan sumber informasi utama melalui media-media yang didukung oleh perangkat teknologi informasi. Banyaknya pilihan terhadap sumber informasi mengakibatkan kelompok individu tersebut lebih peka terhadap isu-isu nasional dibandingkan dengan isu-isu

lingkungan sekitar. Permasalahannya adalah pada perilaku memilih. Untuk kelompok individu di Desa Teluk Empening, potensi untuk tidak



berpartisipasi memilih dapat diakibatkan oleh keyakinan terhadap peserta pemilu. Hal tersebut tidak terlihat pada kelompok individu di Desa Sui Raya Dalam, yang tetap melakukan pemilihan meskipun tidak terlalu meyakini hasil pemilu dapat berdampak pada kehidupan pribadinya. Sehingga yang perlu dievaluasi adalah variabel lain yang memungkinkan masyarakat di Desa Sui Raya Dalam untuk tidak memilih.

Hubungan kesemua penelitian dengan penelitian ini adalah bagaimana melihat perilaku pemilih dalam kelompok masyarakat dalam setiap momentum pemilihan. Namun meski sama-sama meneliti tentang perilaku memilih, penelitian ini akan di fokuskan pada masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di wilayah kepulauan, sebagaimana yang diketahui bahwa masyarakat pulau-pulau memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat daratan dikarenakan lokasi geografis, akses dengan dunia luar dan factor-faktor lainnya.

2.6 Relevansi Teoritis Model Psikologi dalam Pilkada Takalar 2017

Selama beberapa dekade, pekerjaan utama dalam penelitian perilaku pemilih telah berfokus pada penjelasan sosio-psikologis dalam mode analisis makro-ekonomi klasik. Yang terpenting di antara pendekatan-pendekatan ini adalah “model Michigan” yang dominan dalam perilaku memilih, dinamai berdasarkan karya yang berasal dari

ll dkk., di Universitas Michigan pada akhir 1940-an dan '50-an. ni berakar pada karya perintis kajian perilaku pemilih yaitu



Lazarsfeld, Berelson, Gaudet, dan McPhee, yang, pada 1940-an, yang disebut model perilaku pemilih Columbia (Anderson dan Stephenson 2010). Model Columbia berpendapat bahwa afiliasi pemilih pada dasarnya ditentukan pada saat seseorang mencapai usia dewasa, preferensi mereka ditentukan oleh kombinasi dari tiga faktor sosialisasi: status sosial ekonomi, agama dan area tempat tinggal (Anderson dan Stephenson 2010). Apa yang model Michigan tambahkan ke dalam set kriteria profil yang relatif statis ini adalah pengakuan terhadap kemungkinan perubahan dalam pilihan suara individu tanpa perubahan dalam status salah satu dari tiga kriteria utama ini, yaitu, sarana untuk menjelaskan mengapa seseorang akan mengubah pilihan suara tanpa perubahan besar dalam salah satu kriteria ini.

Asumsi teoritis dari model sosiologis didefinisikan dalam tiga karya penting: people choice (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 1944), Voting (Berelson, Lazarsfeld, & McPhee, 1954) dan Personal Influence (Katz & Lazarsfeld, 1955). Penelitian yang dilakukan oleh Lazarsfeld et al. (1944) (dalam viser, 2010) di Ohio State menggunakan kuesioner sebagai teknik investigasi untuk pertama kalinya dalam studi pemilihan presiden AS terpisah dari jenis pendekatan metodologis yang sampai sekarang menjadi ciri studi tentang perilaku memilih. Paul Lazarsfeld, yang minat sebelumnya telah difokuskan pada studi tentang mekanisme

is yang terlibat dalam proses pilihan dan dalam efek publisitas, n media massa pada perilaku konsumen memiliki dua tujuan



utama dalam penelitian ini: untuk mempelajari efek dari paparan media, yaitu, untuk mengetahui bagaimana pemilih sampai pada keputusan mereka dan peran media dalam proses ini;

Penelitian, yang laporannya diterbitkan dengan judul *The People's Choice* (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, (1944), dalam Anderson dan Stephenson 2010), dimulai dengan mengkarakterisasi pendukung dua partai politik utama di AS menggunakan panel yang terdiri dari 600 subjek yang diwawancarai tujuh kali selama tujuh bulan kampanye, untuk kemudian mengidentifikasi pemilih yang mengubah posisi mereka selama periode kampanye, membandingkan tiga kelompok:

- a. mereka yang memutuskan suara sebelum memulai kampanye,
- b. mereka yang keputusannya diambil selama konvensi partai dan
- c. mereka yang memutuskan hanya memilih mereka pada tahap lanjut kampanye

Temuan utama Lazarsfeld dkk adalah bahwa mayoritas pemilih memilih sesuai dengan kecenderungan politik asli mereka. Dari 600 subjek yang dimasukkan, hanya 54 yang mengubah posisi mereka selama proses berlangsung. Hubungan antara perilaku pemilihan dan kelompok sosial tempat mereka berada begitu kuat sehingga memungkinkan untuk menjelaskan pilihan pemilihan hanya menggunakan tiga faktor yang menentukan Indeks Predisposisi Politik yang digunakan dalam penelitian:

sosial-ekonomi, agama dan wilayah tempat (Viser, 2010)

Salah satu dari model sosiologis adalah:



1. Ketidakmampuannya untuk menjelaskan keberpihakan partisan.
2. Penekanan berlebihan pada utilitas kelas sosial sebagai indikator perilaku memilih
3. Kegagalan untuk menghargai pentingnya preferensi kebijakan individu dan penilaian kinerja pemerintah dalam pemilihan.

Model psikososial berawal pada studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Survei di Universitas Michigan selama pemilihan presiden AS 1948, hasilnya dianalisis oleh laporan tahun 1952 disajikan dalam *The Voter Decides*; dan pemilihan umum pada tahun 1956, di mana hasilnya, dikombinasikan dengan yang diperoleh dalam penyelidikan sebelumnya, telah mengarah pada buku *American voter*, yang ditulis oleh Campbell, Converse Miller and Stokes. Karya-karya ini menandai awal dari serangkaian studi panjang yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Survei. Kuisisioner dan basis data investigasi ini adalah rujukan di sebagian besar studi pemilu yang dilakukan di Amerika Serikat (Viser,2010)

Dalam dua dekade setelah penerbitannya, pendekatan Michigan, yang disebarakan secara aktif oleh para pendirinya, terbukti sangat berpengaruh dalam penelitian pemungutan suara di AS dan di Eropa, bahkan menjadi 'arus utama' dalam penelitian pemungutan suara yang berorientasi psikologis sosial. Awalnya, penelitian yang mengikuti pemilih Amerika fokus pada mereplikasi model 'corong kausalitas' dalam sistem

asi lain selain Amerika. Segera ditemukan bahwa variabel sentral



dalam corong, identifikasi pihak, tidak memiliki peran yang sama seperti negara-negara Eropa

Ketika kelayakan konsep ini diuji di luar konteks penelitian aslinya, ternyata perbedaan dalam partai dan sistem pemilu membuat perbedaan penting dalam cara pemilih menghubungkan diri mereka dengan partai politik mereka. Di Inggris Raya, misalnya, Butler dan Stokes (dalam Visser, 2010) menemukan bahwa, sementara mereka dapat melihat banyak bukti untuk posisi partisan yang bertahan lama ('partisan selfimage'), pada saat yang sama para pemilih Inggris dalam memberikan suara mereka dari satu partai dengan yang lain

Citra diri partai dan pilihan suara lebih sering linear daripada di Amerika Serikat. Hasil yang sama segera dilaporkan dalam sistem partai lain, seperti yang terjadi di Jerman Barat, Kanada, dan Belanda (Visser, 2010) Alih-alih menjadi komitmen jangka panjang yang stabil untuk memilih partai tertentu, identifikasi partai di banyak negara Eropa tampaknya lebih atau kurang merupakan cerminan dari pemilihan itu sendiri. Di beberapa negara, yang menampilkan sistem partai yang sangat lancar atau sangat terfraksionasi, pemilih ditemukan untuk mengidentifikasi bukan dengan partai tetapi dengan 'kecenderungan', kecenderungan ideologis umum, atau dengan sejumlah pihak yang terkait erat secara ideologis, meningkat ke identifikasi ideologis

di negara-negara Eropa lainnya, pola-pola pemberian suara yang terkait dengan kelas, agama, dan identifikasi kelompok lainnya, yang



merupakan terjemahan pemilih dari perpecahan sosial yang dalam dan persisten yang dapat secara kognitif mudah dan secara langsung terkait dengan suara yang sesuai untuk partai-partai berbasis perpecahan. Dalam kasus-kasus ini, kekuatan sosial secara langsung memengaruhi sikap dan persepsi politik, tanpa intervensi identifikasi partai.

Namun, konsekuensi dari temuan ini tidak tercermin dalam pengembangan model Michigan. Sebaliknya, para peneliti Michigan memutuskan hubungan antara faktor-faktor sosial dan sikap dalam pendekatan, yang tujuannya adalah untuk sampai pada model pemilihan suara yang paling efisien. Identifikasi partai berfungsi sebagai dasar model, dengan memasukkan semua faktor sosial yang mendahuluinya. Orientasi isu dan kandidat dioperasikan sebagai faktor jangka pendek, faktor-faktor spesifik pemilu, menentukan dalam pemilihan konkret jumlah penyimpangan suara partai dari suara hipotetis berdasarkan identifikasi partai saja, penyimpangan kemudian dapat ditugaskan untuk pengaruh banding kandidat tertentu atau masalah kontroversi seputar pemilihan masing-masing dalam elaborasi lebih lanjut dari model ini untuk Amerika Serikat sendiri peran dasar identifikasi partai juga dipertanyakan, tetapi formulasi alternatif berjalan ke arah yang sangat berbeda daripada dalam situasi Eropa.

Berkaitan dengan pemilihan model psikologis untuk dijadikan dasar

n ini adalah berangkat dari studi awal penulis mengenai an umum pilkada Takalar. Bagaimanapun juga pilkada Takalar



setidaknya sesuai dengan kondisi yang dimunculkan oleh peneliti Michigan dalam kritiknya mengenai pendekatan sosiologis yaitu:

1. Ketidakmampuan pendekatan sosiologis untuk menjelaskan keberpihakan partisan. Kondisi ini di dorong pada asumsi bahwa model pemilihan pilkada Takalar adalah model usungan partai politik dimana terdapat banyak partai yang terlibat di dalamnya, yaitu Bur nojeng yang di dukung oleh 9 partai, yaitu partai Golkar, PPP, Demokrat, Gerindra, Hanura, PDIP, PAN, PBB dan PKPI, sedangkan SK-HD yang juga di dukung oleh 3 partai yakni PKS, Nasdem dan PKB.
2. Penekanan berlebihan pada pengaruh kelas sosial sebagai indikator perilaku memilih, sebagaimana diketahui masyarakat Takalar merupakan masyarakat homogen dimana profil demografis pemilih tidaklah se-majemuk masyarakat Amerika dan Eropa sementara model sosiologis hanya efektif untuk meneropong masyarakat yang lapisan sosialnya cenderung majemuk. Provinsi Sulawesi Selatan contohnya.
3. Kegagalan untuk menilai pentingnya preferensi individu dalam memberi penilaian-penilaian kinerja pemerintah dalam pemilihan, sementara diketahui bahwa salah satu kandidat adalah petahana dimana kebijakan yang telah dikeluarkan menjadi penentu perolehan suara yang didapatkan.



4. Kondisi geografis masyarakat Takalar terutama di Kepulauan Tanakeke menyulitkan akses informasi sehingga tidak relevan dengan preposisi yang dibangun oleh model sosiologis bahwa masyarakat sangat tergantung pada media pemberitaan dalam menentukan pilihan.

Sebaliknya justifikasi teoritis yang dimunculkan oleh mazhab Michigan dibangun dengan preposisi yang cenderung konteks dengan fenomena politik pra pemilihan di Takalar yang tampak dari :

1. Perebutan dukungan partai dimana masing-masing kandidat memperebutkan dukungan partai Golkar sebagai partai yang mendominasi perolehan suara selama sejarah pemilihan di kabupaten Takalar sehingga memunculkan asumsi peran partai yang begitu besar pada setiap kontestasi pemilihan.
2. Dalam banyak penelitian, telah disebutkan bahwa budaya politik masyarakat Takalar yang sangat bercorak patrimonial sehingga mengedepankan figure yang berkompetisi.
3. Tingkat pendidikan yang rendah memicu asumsi bahwa masyarakat cenderung emosional dalam menentukan pilihannya.

Dari fenomena politik diatas maka penulis kemudian mengkonstruksi penelitian berdasarkan 3 preposisi kunci yang dibangun oleh mazhab Michigan yaitu:

pilihan seseorang harus dipahami sebagai pernyataan loyalitas (identifikasi partai) yang dibentuk oleh pengalaman sepanjang



hidup dan untuk waktu yang sangat lama. Kondisi ini hanya memungkinkan jika pemilih memiliki sikap dan orientasi politik dan pengetahuan yang tinggi mengenai landasan partai tertentu.

Maksudnya adalah, pemilih cenderung dikategorikan sebagai massa ideologis idaman, contoh konkritnya seperti:

- a. Pemilih PKS pada masa awal reformasi yang memilih karena dorongan agama yang secara ideologis bersinergi dengan platform dan gerakan partai
 - b. Pemeluk katolik di amerika cenderung memilih partai berhaluan konservatif
 - c. Massa marhaen yang terafiliasi dengan PDI pada masa orde baru.
 - d. Seseorang berideologi sosialis cenderung memilih partai Komunis.
2. Orientasi terhadap kandidat bukan pada karakteristik figur tertentu melainkan prospek ideologis yang didapatkan dengan memilih kandidat tertentu dimana kandidat mempengaruhi pilihan suara dalam dua cara: langsung dan tidak langsung.
- a. Secara langsung : bahwa kandidat dipilih karena pertimbangan moralitas kolektif maksudnya adalah secara figur, kandidat dipilih karena menjanjikan kesan yang secara moral mampu diterima oleh masyarakat (contohnya adalah :



masyarakat yang agamis hanya memilih figur yang agamis karena menjanjikan pola kepemimpinan agamis)

- b. Secara tidak langsung karena 3 hal yaitu, yang pertama, pengaruh dari pimpinan partai, (siapa yang menjadi tokoh partai), kedua, reaksi positif dan negative dari kebijakan petahana. (masyarakat yang merespon negatif petahana cenderung memilih kandidat dengan karakter yang berlawanan) contohnya, kesan Lamban, tidak tegas dan kurang merakyat yang muncul sebagai penilaian masyarakat terhadap SBY pada akhir kepemimpinannya membuat popularitas Jokowi (responsif dan merakyat) dan Prabowo (tegas dan bertanggungjawab) meroket. Dan ketiga, komposisi aktor dalam koalisi (komposisi figur dalam koalisi menentukan reaksi masyarakat. Ada keraguan dalam diri voter jika salah satu tokoh koalisi secara moral di tolak. Atau menjadi militan saat semuanya diterima.
3. Secara moral pemilih akan memilih isu yang membuat dirinya merasa aman secara psikologis dan cenderung memilih berdasarkan dengan prioritas kebijakan yang dilakukan kedepan. Dimana Ada 2 tipe isu yang memengaruhi pemilih yaitu isu moral dan isu kebijakan .



- a. Apakah kebijakan dari kontestan memiliki dampak ideologis bagi pemilih. (contohnya : isu jika Azis Kahar terpilih sebagai

wakil gubernur Sulsel maka syariat islam akan diberlakukan di Toraja membuat suaranya turun drastis di daerah tersebut. Atau isu tenaga kerja asing mempengaruhi peningkatan suara Donald Trump yang berjanji untuk lebih memaksimalkan tenaga kerja dari kulit putih)

- b. Persepsi pemilih mengenai perbandingan perbedaan kandidat dalam kebijakan untuk masalah yang sama mempengaruhi pemberian suara. (contoh : isu investasi : Jokowi akan tunduk kepada asing sementara Prabowo tidak akan)

2.7 Signifikansi Penelitian

Baik secara sosiologis ataupun psikologis penelitian tentang Perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya bukanlah merupakan kajian yang baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Sejak kemunculannya pada pertengahan abad 20, para ilmuan politik telah mencoba mengabstraksi mengenai dorongan-dorongan individu dalam menentukan pilihan terutama untuk menjawab apa kecenderungan pokok dalam preferensi politik masyarakat.

Seiring dengan semakin dewasanya proses pemilu di Indonesia setelah terbelenggu oleh praktik curang pemilu zaman orde baru dan ekspresi politik individu semakin dapat teraktualkan dalam pemilu,

marak penelitian dengan tema perilaku yang berkembang kajian ilmu politik di Indonesia.



Puluhan literatur mengenai perilaku pemilih dari 3 pendekatan yang tersedia memunculkan pertanyaan mengenai nilai penting penelitian tersebut bagi dimensi praktis dan akademik bagi kehidupan politik di Indonesia. Sementara dominan penelitian tentang perilaku politik hanya mencoba mendeskripsikan dan memberi penjelasan mengenai preferensi politik masyarakat.

Dalam menjawab signifikansi ini, penulis mencoba untuk mencari tahu preferensi politik masyarakat dari segi psikologis masyarakat kepulauan. Pada dasarnya, penelitian tentang perilaku politik yang senantiasa menjadi menarik untuk diteliti mengingat karakteristik masyarakat pada masing-masing wilayah sangatlah beragam. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun lapisan masyarakat yang sama. Kondisi ini dipengaruhi oleh akumulasi pengalaman kolektif masing-masing wilayah mempengaruhi karakteristik masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa signifikansi penelitian dibagi dalam 3 hal yaitu :

1. Dari segi pilkada, pilkada Takalar merupakan fenomena menarik untuk diteliti jika dilihat dari hasil pemilihan. Dimana pasangan petahana dapat dikalahkan oleh pasangan penantang, yang dimana selama masa kampanye pasangan petahana ini senantiasa memiliki hasil survey yang jauh lebih unggul. Bahkan hasil survey seminggu sebelum pemilihan petahana masih unggul dengan perolehan 64% namun secara mengejutkan kalah dari



pasangan penantang yang di usung oleh partai koalisi yang lebih sedikit di banding partai koalisi pendukung petahana.

2. Dari segi masyarakat, masyarakat Kepulauan Tanakeke merupakan bagian masyarakat Takalar yang secara demografis memiliki lapisan yang sama dengan masyarakat Takalar di daerah daratan, hanya saja secara teoritis, masyarakat kepulauan memilik karakter yang cukup berbeda dengan masyarakat daratan. Contohnya adalah lalu lintas informasi dan perpindahan penduduk yang tidak lancar kerap kali menjadikan masyarakat kepulauan lebih “terbelakang”. Pola hidup masyarakat kepulauan yang dominan beraktifitas di lautan pada malam hari membuat kehidupannya berbeda dengan masyarakat daratan yang cenderung beraktifitas di daerah pertanian pada siang hari. Pengalaman hidup yang berbeda secara psikologis dapat membentuk preferensi yang berbeda dalam masyarakat meskipun secara sosiologis berada dalam kondisi yang sama.
3. Dari segi teoritis, dalam beberapa kajian mengenai perilaku pemilih, terutama dalam model Michigan, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian yang mangklaim kebangkitan *party ID* di Indonesia, terkhusus di Sulawesi selatan. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa *party ID* berkembang berdasarkan dari

onsistensi jumlah perolehan suara partai dalam Pileg bandingkan dengan pemilihan kepala daerah. Seperti yang



dikemukakan oleh Haryanto (2015) yang meneliti tentang konsistensi suara golkar pada pemilihan legislatif provinsi tahun 2014 dan 2009, konsisten dengan jumlah perolehan kandidat gubernur yang diusung oleh partai golkar pada tahun 2013 dan 2007. Serta penelitian lainnya yang melihat ada konsistensi jumlah pemilih PKS dengan perolehan suara beberapa kandidat yang identik dengan partai tersebut. Haryanto menganggap ada pola kebangkitan party ID dalam pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini secara signifikan mampu memberikan sumbangan penjelasan mengenai pola party ID di pemilihan kepala daerah di Takalar yang merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Selatan.

2.8 Kerangka Pikir

Partisipasi politik merupakan hal yang penting pada masa demokrasi, oleh karena partisipasi politik dianggap sebagai salah satu wujud demokrasi di Negara Indonesia pada saat ini. Maka partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan sehingga pemerintahan yang ideal diharapkan warga Takalar akan terwujud. Tingkat partisipasi pemilih dari Kepulauan Tanakeke secara langsung mempengaruhi legitimasi politik calon terpilih dan tidak langsung akan berimplikasi terhadap prioritas pembangunan dari calon terpilih, yang jika hal ini terjadi berlarut-larut, bukan tidak mungkin suatu hari akan terjadi kesenjangan pembangunan

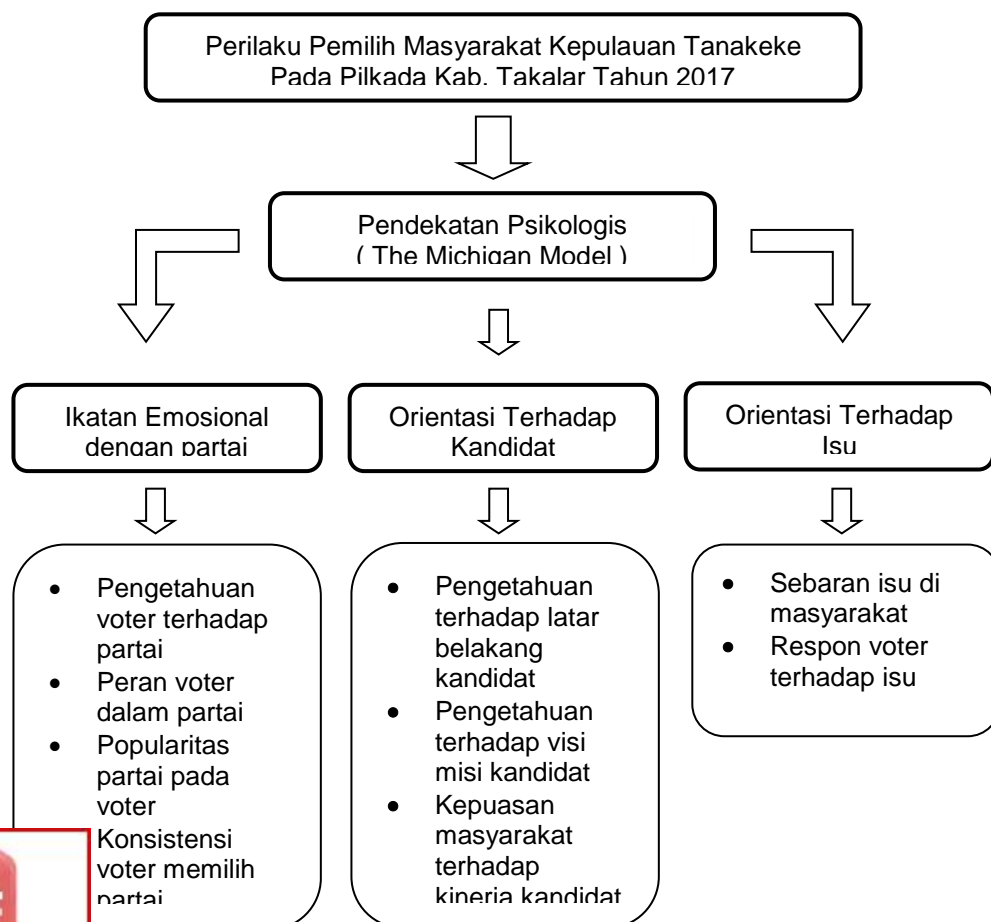
segitu besar antara daratan dan kepulauan sebagai imbas dari demokrasi.



Guna memutus mata rantai apatisme berpolitik dan membangun pemilihan umum yang berkualitas dan partisipatif maka penting kirannya untuk dianalisis mengenai perilaku pemilih dari dimensi yang telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu yaitu: Dimensi Psikologis yang mengacu pada sikap pemilih dengan melihat : (1) ikatan emosional, (2) orientasi terhadap isu dan (3) orientasi terhadap kandidat.

Adapaun kerangka pemikiran diatas secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



2.9 Definisi Operasional

Untuk membantu peneliti dalam membatasi areal pengambilan data, maka perlu adanya pembatasan operasional yang meliputi :

1. Masyarakat Kepulauan Tanakeke yang di maksud dalam penelitian ini adalah warga Negara yang bertempat tinggal menetap dan secara sah di kepulauan Tanakeke dan memiliki hak pilih pada Pemilihan Bupati Takalar Tahun 2017. Pulau Tanakeke sendiri secara administratif terdiri dari 5 desa yaitu :Desa Balangdatu, Maccini Baji, Rewataya, Tompo Tanah dan Desa Mattiro Baji.
2. Perilaku pemilih adalah kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan dalam proses politik yang dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melihat menggunakan Michigan state model dalam Dimensi psikologis yaitu :
 - a) ikatan emosional, dapat dilihat dari bagaimana masyarakat bersikap dalam membentuk kecenderungan memilih melalui nilai kepercayaan, kedekatan dan pembentukan identitas serupa dengan kandidat
 - b) orientasi terhadap isu dapat dilihat dari bagaimana sikap dan respon masyarakat pada isu-isu seputar pilkada takalar tahun 2017. Oleh karena itu dalam poin ini akan di jabarkan seputar isu terkait pada pilkada takalar tahun 2017

orientasi terhadap kandidat, dapat dilihat melalui penilaian individual dan kelompok terhadap kandidat dalam pilkada Takalar.

